

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS
TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH
DI KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan**



Oleh :

Wahyu Nur Utami

14804244002

PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS
TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH
DI KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan**



Oleh :

Wahyu Nur Utami

14804244002

PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AGRIBUSNIS BPRS
TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH
DI KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh :

Wahyu Nur Utami

14804244002

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 2 April 2018

untuk dipertahankan di depan TIM Pengaji Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Prof. Zamroni, Ph.D

19471010 197503 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

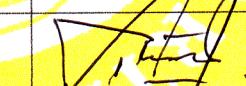
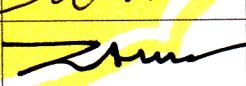
Oleh:

WAHYU NUR UTAMI

14804244002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Mei 2018 dan
dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

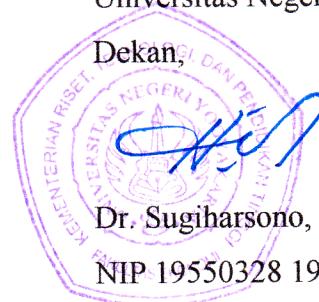
Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Sukidjo, M. Pd.	Ketua Penguji		8/6/2018
Prof. Suyanto, Ph. D.	Penguji Utama		9/6/2018
Prof. Zamroni, Ph. D.	Sekretaris Penguji		9/6/2018

Yogyakarta, 25 JUNI 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP 19550328 198303 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

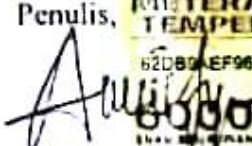
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nur Utami
NIM : 14804244002
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Penulis, 
620804EF961712310


Wahyu Nur Utami

NIM. 14804244002

MOTTO

“Innama Amruhu Idza Arada Syai”an An Yaqula Lahu Kun Fayakun”

(QS. Yasin: 82)

“People don’t care about what you say, they care about what you build”

(Mark Zuckerberg)

“Don’t die before you are dead. Be grateful and live, and live every moment”

(Muniba Mazari)

“Your face is the mirror that reflects your soul. Those who shine from within

don’t need a spotlight”

(Muniba Mazari)

“Making hope to our self, then giving hope to others”

(Wahyu Nur Utami)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan Tugas Akhir Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan cintai, beliau yang selalu mendoakan, mempercayai, dan memberikan dukungan.
2. Nenek yang selalu mempercayai dan mendukung keputusanku dalam memilih jalan kehidupan.
3. Kakakku yang selalu mengajari aku rendah hati dan sabar.
4. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
5. Teman-teman yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan saling menghibur satu sama lain.
6. Orang-orang yang dalam usaha atau diam mendoakan kebaikan untukku.

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:
Wahyu Nur Utami
14804244002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Prosedur pembiayaan agribisnis pada BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Peluang dan tantangan pembiayaan agribisnis pada BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 3) Efektifitas pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi, sedangkan untuk pemerikasaan data menggunakan *cross check*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, khususnya PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdiri dari 3 tahap yaitu a) tahap pengajuan pembiayaan yang terdiri dari pengisian form pembiayaan oleh nasabah, BI *Checking*, dan survey lapangan, b) tahap pencairan dana yang dilaksanakan bersamaan dengan akad, c) tahap pengembalian pembiayaan oleh nasabah. 2) Peluang sektor agribisnis yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah, khususnya kebutuhan pangan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hambatan-hambatannya yaitu a) sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko, b) lamanya waktu usaha di bidang agribisnis, c) sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar, d) orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit. 3) Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Namun, jika dilihat dari hasil distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut dinilai kurang efektif karena hanya terdapat 19 nasabah agribisnis pada tahun 2017 yang menggunakan pembiayaan di kedua BPRS tersebut.

Kata Kunci: Prosedur Pembiayaan Agribisnis BPRS, Peluang dan Hambatan, Efektivitas Pembiayaan Agribisnis.

**EFECTIVNESS OF AGRIBUSINESS FINANCING OF BPRS ON
CUSTOMER'S AGRICULTURAL PRODUCTS IN BANTUL DISTRICT,
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

By:
Wahyu Nur Utami
14804244002

ABSTRAC

The purpose of this research is to know: 1) Agribusiness financing procedure at BPRS in Bantul District, Special Region of Yogyakarta, 2) Opportunities and challenges of agribusiness financing at BPRS in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, 3) Effectiveness of agribusiness financing of BPRS on customer's agricultural product in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.

This research is a qualitative research supported by quantitative data. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Analytical technique used to test the validity of data is a triangulation technique, as for the verification of data using cross check..

The results of this study indicate that: 1) BPRS agribusiness financing procedure in Bantul Regency, especially PT BPRS Bangun Drajal Warga and PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera consists of 3 stages, namely a) stage of financing submission consisting of completion of financing form by customer, BI Checking , and field survey, b) disbursement stage of fund held simultaneously with the contract, c) return stage of financing by the customer. 2) Agribusiness sector opportunity that can meet the food needs of a region, especially food needs in Bantul District, Special Region of Yogyakarta. While the barriers are a) the agribusiness sector is a risky business sector, b) the length of time of business in the field of agribusiness, c) agribusiness sector requires a large input costs, d) people working in the agribusiness sector is getting less. 3) Agribusiness financing on the results of customers' business PT BPRS Bangun Drajal Residents and PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera in 2017 can be said to be effective because the turnover of all agribusiness customers who have used the financing has increased from 12% to 85%. However, when looked from the results of the distribution of both BPRS financing is considered less effective because there are only 19 agribusiness customers in 2017 who use the financing in both the BPRS.

KEY WORD: BPRS Agribusiness Financing Procedures, Opportunities and Constraints, Effectiveness of Agribusiness Financing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

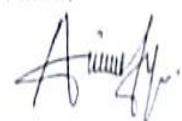
1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin terkait administrasi.
3. Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan motivasi.
4. Prof. Zamroni, Ph. D. selaku Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan.
5. Prof. Suyanto, Ph.D. selaku Narasumber yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
6. Prof. Dr. Sukidjo, M. Pd. selaku ketua penguji yang telah membeikan kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.

8. Pimpinan, karyawan, dan nasabah BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini
9. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moral maupun materil.
10. Teman–teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi 2014 yang saling memberi dukungan, motivasi, dan masukan satu sama lain.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Penulis,



Wahyu Nur Utami

NIM. 14804244002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Efektivitas	11

2. Pembiayaan.....	14
3. BPRS	18
4. Pertanian	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berfikir	38
D. Pertanyaan Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	46
F. Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	50
1. Gambaran Umum BPRS Bangun Drajat Warga.....	50
2. Gambaran Umum BPRS Madina Mandiri Sejahtera.....	56
B. Penyajian Data	63
1. Prosedur Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul	63
2. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Agribisnis pada BPRS di Kabupaten Bantul	77
3. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul	

terhadap Hasil Usaha Nasabah	82
C. Analisis Data.....	88
1. Prosedur Pembiayaan Agribisnis PT BPRS di Kabupaten	
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.....	88
2. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Agribisnis BPRS	
di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	94
3. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis terhadap Hasil Usaha	
Nasabah BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta....	97
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Simpulan	102
B. Implikasi.....	104
C. Keterbatasan Penelitian.....	105
D. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

1. Tabel Daftar Pemegang Saham PT BPRS Bangun Drajat Warga	51
2. Tabel daftar pemegang saham PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	58
3. Tabel Realisasi Pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tahun 2015 s.d. 2017	64
4. Tabel Realisasi Pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga Tahun 2015 s.d. 2017	65
5. Tabel Jenis Akad Pembiayaan Sektor Agribisnis di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga	65
6. Tabel Presentase Pembiayaan Agribisnis BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	83
7. Tabel Data Nasabah Agribisnis yang Menggunakan Pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Per 2017	84
8. Tabel Data Nasabah Agribisnis yang Menggunakan Pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga Per 2017	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian di PT BPRS Bangun Drajat Warga110
2. Surat Keterangan Penelitian di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera111
3. Pedoman Wawancara PT BPRS Bangun Drajat Warga112
4. Pedoman Wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera115
5. Pedoman Wawancara Nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga.....118
6. Transkip Wawancara PT BPRS Bangun Drajat Warga121
7. Transkip Wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera133
8. Transkip Wawancara Nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera146
9. Dokumentasi162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memegang peranan sangat strategis dalam perekonomian negara Indonesia, khususnya dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2016 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 31,90%. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap kelangsungan sektor industri, karena bahan baku industri sebagian besar dari hasil pertanian. Selain itu, pertanian menjadi pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil, dll.

Mengingat pengalaman pada tahun 1990-an, sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis. Dari pengalaman tersebut dapat diambil pelajaran bahwa menggantungkan perekonomian pada kegiatan ekonomi yang tidak berbasis sumber daya sangat rentan terhadap dinamika lingkungan eksternal. Maka dari itu, untuk memperkuat perekonomian suatu negara diperlukan dukungan dari berbagai pihak diantaranya yaitu pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya, dengan salah satunya yaitu di bidang pertanian.

Pertanian tidak hanya memegang sektor penting di lingkup negara, namun juga di daerah-daerah yang masih memiliki potensi di sektor pertanian. Salah satunya yaitu di Bantul, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2015, BPS mencatat luas lahan pertanian di daerah ini sebesar 15.225 Ha, atau

sebesar 27,47% dari luas pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2016 menyumbang sebesar Rp11.456.172,97 terhadap Produk Domestik Bruto Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang memegang peranan strategis dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun sektor pertanian memiliki peran yang strategis, sektor ini masih menghadapi banyak permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan modal petani dan pelaku usaha pertanian lain. Perkiraan kebutuhan modal yang akan datang semakin meningkat akibat semakin tingginya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan, maupun upah tenaga kerja. Di satu sisi, pelaku usaha di sektor pertanian sebagian besar adalah petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil, dan sering menghadapi kendala kurangnya permodalan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pertanian di Indonesia.

Berdasarkan realita di atas, pelaku usaha di bidang pertanian membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun perbankan. Dana yang bersumber dari pemerintah sangatlah terbatas untuk pengembangan sektor pertanian, terlebih pada abad 21 ini, kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional semakin meningkat. Dana yang bersumber dari APBN tidaklah cukup untuk membiayai semua sektor, terlebih sektor pertanian dalam mengolah lahannya. Selain pemerintah, pihak swasta ikut berperan serta membiayai pembangunan potensi ekonomi masyarakat, khususnya pada bidang pertanian. Namun pihak swastapun, secara individual

maupun kelembagaan mengalami keterbatasan ketersediaan dana untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta perbankan nasional dalam penyediaan modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif, khususnya sektor pertanian.

Perbankan nasional memiliki andil dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Melalui perbankan, para pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar dapat mengembangkan usahanya. Hasil dari pengembangan usaha ini tentunya mampu meningkatkan sektor perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu perbankan nasional dapat pula digunakan sebagai ukuran kemajuan perekonomian suatu negara. Artinya, semakin maju negara tersebut maka semakin besar pula kontribusi perbankan terhadap pembangunan nasional.

Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Perbedaan utama bank umum

dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jaringan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya dalam kegiatan usahanya dianut *dual banking system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan utama perbankan konvensional dengan perbankan syariah yaitu pada bagian falsafahnya. Perbankan konvensional menggunakan praktik bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan praktik bagi hasil. Dalam kegiatan operasionalnya, perbankan konvensional menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Berbeda halnya dengan perbankan syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu. Jika dilihat pada perbedaan di atas, perbankan syariah merupakan salah satu perbankan yang tepat dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha di bidang agribisnis.

Perkembangan perbankan syariah itu sendiri dimulai ketika pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. Bentuk komitmen tersebut dengan mengesahkan Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah (Muhammad, 2005). Keberadaan UU No.10 tersebut memberikan kepada industri perbankan untuk meningkatkan penawaran dengan cara membuka sejumlah bank-bank syariah baru. Hal tersebut didukung dengan penetapan *dual banking system* yang

memperbolehkan bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri menjadi bank syariah.

Pesatnya perkembangan bank syariah juga diikuti oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah). BPR Syariah sebagai penyangga ekonomi masyarakat di level menengah dengan sistem syariah yang secara aktif melakukaan sosialisasi/penelitian terhadap usaha-usaha berskala kecil yang membutuhkan modal. Keberadaan BPR Syariah merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BPR Syariah mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BPR Syariah adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah, hal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil, terutama masyarakat yang sumber penghasilannya berasal dari sektor pertanian.

Jika ditarik garis tengah antara peran perbankan syariah dan kebutuhan dalam sektor pertanian khususnya di daerah Bantul, maka ada satu kesinambungan pada sistem pertanian dan bank syariah. Perbankan syariah memiliki peran melakukan pembinaan dan pendanaan bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Di lain sisi sektor pertanian yang memerlukan pembiayaan dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan tidak hanya membebankan biaya peminjaman kepada pihak petani jika mengalami kerugian. Melihat besarnya resiko yang ada pada sektor pertanian, perbankan syariah merupakan *partner* yang tepat dalam pembiayaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil pertanian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas pembiayaan agribisnis yang digunakan oleh bank syariah khususnya BPR Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku agribisnis di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana pembiayaan-pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan hasil pangan untuk pasokan yang cukup terhadap kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta perbaikan ekonomi yang berkesinambungan untuk negara Indonesia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, hal inilah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk mencoba membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Meskipun sektor pertanian memiliki peranan yang penting, masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu segera dibenahi. Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2016 menyumbang sebesar 10,41% dalam PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada daerah Bantul pada tahun 2016 hanya sebesar 7,19% dari PDRB. Sektor pertanian di Bantul menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Akar permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain karena sebagian besar pelaku agribisnis adalah petani kecil dengan skala usaha

mikro yang hanya memiliki lahan kecil. Kebutuhan modal yang semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin melonjaknya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan, maupun upah tenaga kerja.

2. Adanya keterbatasan petani dalam memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan, seperti kesulitan memenuhi agunan sertifikat tanah, pembayaran bunga, dan lain-lain membuat para pelaku agribisnis enggan untuk mengajukan pembiayaan di bank.
3. Pergantian lahan pertanian menjadi lahan industri. Telah diketahui bahwa pada akhir-akhir tahun ini banyak terjadinya pembangunan tempat-tempat pariwisata ataupun perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan lahan pertanian. Pergantian lahan pertanian menjadi lahan industri tersebut berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian.
4. Lambatnya kenaikan harga produk ini dinilai dari penentuan harga-harga hasil produksi pertanian yang tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Hal ini diketahui bahwa produk hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas dan melihat luasnya ruang lingkup sektor agribisnis, perlu adanya pembatasan masalah penelitian. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan keterbatasan modal atau pembiayaan petani. Berikut batasan masalah yang diambil.

1. Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, yaitu PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Identifikasi peluang dan hambatan dalam pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian difokuskan pada aspek efektifitas pembiayaan terhadap hasil pertanian nasabah oleh 2 BPR Syariah dari 3 kantor pusat BPR Syariah di Bantul yaitu PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan pada petani. Pemilihan kedua BPR Syariah ini didasarkan oleh dekat tidaknya lokasi terhadap daerah pertanian setempat, lama berdirinya BPR Syariah tersebut, dan lembaga kerjasama yang menjamin kredibilitas dengan sistem syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, berikut rumusan masalah yang dapat dibuat:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peluang dan hambatan pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana efektifitas pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Mengetahui dan memahami prosedur pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan memahami peluang dan tantangan pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui dan memahami efektifitas pembiayaan agribisnis BPR Syariah terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian mengenai efektifitas pembiayaan agribisnis BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama menempuh studi pendidikan ekonomi ke dalam karya nyata. Selain itu, peneliti dapat mengetahui prosedur dan efektifitas pembiayaan agribisnis BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta peluang dan hambatan yang dihadapinya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pembiayaan agribisnis BPR Syariah terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul. Sehingga diharapkan anggota masyarakat atau petani pada khususnya lebih memahami tentang pembiayaan agribisnis oleh perbankan syariah.

c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memberikan perhatian khusus terkait pembiayaan pada sektor agribisnis di Indonesia pada umumnya, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.

d. Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi kepada perbankan syariah pada umumnya, dan BPR Syariah di Yogyakarta pada khususnya untuk meningkatkan program pembiayaan pada sektor agribisnis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Istilah Ekonomi mengartikan efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.

Menurut Hamdan Mansoer (1989) pengertian efektif yaitu harus mampu menyelesaikan upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan, tidak menyimpang dari rencana atau sesuai dengan apa yang diacu semula. Ismail Solihin dalam bukunya *Pengantar Manajemen* menjelaskan bahwa kegiatan manajemen dikatakan efektif jika kegiatan manajemen tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ahmad Sofan Anshor (2016: 16), menyebutkan efektivitas adalah menyangkut tujuan (*doing the right things*) atau ukuran perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai.

Menurut T. Hani Handoko (2015: 7), menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih

pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Richard M. Steers, dkk (1985: 72), menyebutkan *organizational effectiveness as an organization's ability to acquire and efficiently use available resources to achieve its goals. Effectiveness is the best judge against whatever objectives the organization truly intends to pursue.*

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah ukuran kemampuan yang menyatakan seberapa besar target atau tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dengan cara yang tepat. Untuk mempermudah dalam pengukuran target yang telah dicapai, target ditetapkan terlebih dahulu dengan ukuran-ukuran yang pasti. Dalam kata lain, efektivitas berguna untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

b. Hubungan Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Richard M. Steers, dkk (1985: 72-73), menyebutkan adanya hubungan antara konsep efektivitas dan konsep efisiensi. Efektivitas diartikan sebagai tujuan yang dicapai dengan cara yang tepat, sedangkan efisiensi merepresentasikan perbandingan antara biaya

(*input*) dan keuntungan (*output*) yang dicapai. Dalam ekonomi makro (Case and Fair, 2006: 302) disebutkan bahwa perekonomian yang efisien adalah yang memproduksi barang-barang yang diinginkan orang dengan biaya termurah. Hubungan yang dimaksud adalah dalam mencapai tujuan itu sendiri.

c. Kriteria Penilaian Efektivitas

Adapun menurut T. Hani Handoko (2015: 103-105), ada beberapa kriteria penilaian efektifitas perencanaan, yaitu mencakup:

1) Kegunaan

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.

2) Ketepatan dan objektivitas

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Agar tercapai perencanaan yang efektif, proses penyusunannya harus didasarkan atas pemikiran yang objektif.

3) Ruang lingkup

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*) dan konsistensi. Berapa luas cakupan rencana? Menyangkut kegiatan apa saja? Bagaimana

kerangka hubungan antarkegiatan? Satuan-satuan kerja atau departemen-departemen mana yang terlihat?.

4) Efektivitas biaya

Efektivitas biaya perencanaan dalam perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

5) Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan: 1) tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu perencanaan harus mencakup keduanya.

6) Ketepatan waktu

Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Dalam penerapannya, pembiayaan memiliki fungsi dan manfaat.

Berikut fungsi pembiayaan antara lain (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan
- 4) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran

Berikut manfaat pembiayaan antara lain (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

- 1) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah.

2) Manfaat Debitur

Adapun manfaat bagi debitur adalah debitur tidak akan dituntut untuk pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan debitur juga tidak dibebani oleh sejumlah bunga, namun akan memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat melalui 3 aspek yaitu sebagai berikut :

1) Dilihat dari segi jangka waktu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 167).

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun

Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.

c) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang

2) Dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu.

Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.

3) Dilihat dari segi kegunaannya (Kasmir, 2003: 76):

a) Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.

b) Pembiayaan Modal

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Perbankan di Indonesia

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Secara umum lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 5).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992, lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum maupun bank perkreditan rakyat dapat memilih melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bank konvensional atau berdasarkan prinsip bank syariah.

Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang 10 tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 1998 mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari kegiatan

usahaanya, maka secara umum Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank umum.

b. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disebut BPRS awalnya merupakan penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Pembiayaan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Pembiayaan Kecamatan (LPK), Badan Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang setara.

Berdirinya BPR Syariah tidak lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), lembaga keuangan syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Dengan adanya keterbatasan jangkauan BMI di wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa, muncullah BPR Syariah yang berperan untuk menangani masalah tersebut.

Melalui diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat.

c. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga *At-Tamwil as-Sya'bi al-islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disebut BPRS adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian BPRS pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

d. Perbedaan BPR dengan BPRS dan BPRS dengan Bank Syariah

Lainnya

Secara umum BPR dan BPRS adalah sama. Persamaan ini dilihat dari berdirinya BPRS yang dipengaruhi oleh berdirinya BPR yang sebelumnya telah didirikan. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada prinsip operasionalnya. BPR dapat menjalankan kegiatan operasinya secara konvensional juga syariah. Namun pada kenyataannya, BPR lebih sering dan bahkan hanya menggunakan prinsip konvensional pada setiap kegiatannya, sedangkan kegiatan operasional BPRS hanya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan BPRS dengan bank syariah lainnya yaitu terletak pada lingkup kegiatan. BPRS hanya melakukan kegiatan di satu wilayah tertentu sedangkan Bank Syariah dapat mencakup jangkauan dunia. Kegiatan BPRS hanya dibatasi dalam menghimpun dan menyalurkan

dana, sedangkan Bank Syariah lebih luas. Meskipun demikian, BPRS memiliki karakter operasional yang spesifik sehingga dapat memfokuskan untuk melayani masyarakat pedesaan dan juga UMK. (Muhammad Sholahuddin, 2014: 136-137).

e. Tujuan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian (Heri Sudarsono, 2012: 95), yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- 4) Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

f. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada dasarnya kegiatan usaha BPR Syari'ah hampir sama dengan kegiatan Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Perbedaanya adalah BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
- c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
- e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

- 3) Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sebagai usaha penyaluran dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain (Heri Sudarsono, 2012: 95).

- 1) Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan *amanah*, karena bank merupakan penerima titipan *amanah* dari nasabah. Disebut dengan titipan *amanah* karena bentuk perjanjian adalah *wadiyah*, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Namun, bank akan tetap memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

- 2) Tabungan Wadiyah

Dalam tabungan *wadiyah* ini, bank menerima tabungan nasabah dalam bentuk tabungan bebas. *Akad* yang digunakan yaitu dalam bentuk *wadiyah*. Di sini, bank tidak menanggung resiko kerugian dan bank akan tetap memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tersebut diperoleh dari bagi hasil nasabah dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus *wadiyah* dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah setiap bulan.

Berikut ketentuan umum tabungan *wadiyah* (Ir. Adiwarman A. Karim, 2011 : 346).

- a) Tabungan *wadiyah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

3) Deposito *Wadiyah* Mudharabah

Dalam deposito ini, bank menerima deposito berjangka dari nasabahnya. Akad yang digunakan dapat berbentuk *wadiyah* atau

mudharabah. Pada umumnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan, dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal.

Sementara dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan sebagai berikut :

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Melalui pembiayaan ini, bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah dibuat kedua belah pihak.

Berikut rukun pembiayaan *mudharabah* (Ir. Adiwarman A. Karim, 2011 : 205).

a) Pelaku

Dalam akad *mudharabah* minimal harus ada 2 pelaku. Pelaku pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pelaku kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.

b) Objek *mudharabah*

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*.

c) *Ijab-Qabul*

Dalam *ijab-qabul* ini kedua belah pihak harus secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

d) *Nisbah* keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan ini bank akan melakukan perjanjian dengan pengusaha atau nasabah. Bank dan pengusaha membuat janji bersama dalam membiayai suatu proyek yang juga dikelola bersama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

Menurut mayoritas ulama fiqh sendiri, rukun *musyarakah* (Fathurrahman Djamil, 2012: 168) adalah adanya para pihak yang bekerja sama (*asy-syukara*), modal (*ra'sul maal*), usaha atau proyek (*al-masyru'*), dan pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*).

3) Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil*

Dalam pembiayaan ini, bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung kegiatan operasional usaha atau proyek yang sedang diusahakan oleh nasabah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS dapat memberikan jasa keuangan yang sama dengan bank syariah lainnya. Dalam Pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 yang mengatur tentang pembatasan usaha BPRS. Berikut kegiatan operasional BPRS:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

1) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiyah* atau *mudharabah*.

2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiyah* atau *mudharabah*.

b) Melakukan penyaluran dana melalui:

1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:

a) Mudharabah

b) Istisna

c) *Ijarah*

d) *Salam*

e) Jual beli lainnya

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:

a) *Mudharabah*

b) *Musyarakah*

c) Bagi hasil lainnya

3) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip:

a) *Rahn*

b) *Qard*

Dalam aktivitas operasional perbankan berdasarkan UU No. 21

Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.

4) Melakukan kegiatan usaha perasuransi, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syari'ah.

5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

f. Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Bagi hasil itu sendiri merupakan salah satu hal yang mendasari perbedaan perbankan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Jika perbankan menganut sistem bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaan bagi hasil, penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa besarnya rasio bagi hasil diperoleh dari jumlah keuntungan yang diperoleh. Namun jika proyek yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tetang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, menentukan sebagai berikut:

Ketentuan umum :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

4. Pertanian

a. Pengertian Petani dan Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan. Jadi secara umum petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pada pasal 1 ayat (5) juga dijelaskan bahwa komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

b. Masalah Ekonomi Pertanian

Terdapat beberapa masalah ekonomi pertanian yang ada di Indonesia (Moehar Daniel, 2002: 34-48).

1) Waktu Usaha Tani

Dalam sektor pertanian, selama ini waktu dianggap menjadi masalah dalam proses produksi karena lamanya menunggu. Mulai dari proses pembibitan hingga pada waktu memperoleh hasil. Jika umur padi mulai dari benih sampai panen mencapai empat bulan, petani harus menunggu sambil merawat tanamannya hingga sedemikian rupa. Maka dari itu, jika berbicara mengenai usaha pertanian maka hal tersebut tidak lepas dari alam, dan butuh waktu sesuai dengan ciptaan Illahi.

2) Biaya Usaha Tani

Biaya seringkali menjadi masalah bagi para petani, terutama dalam pengadaan input atau sarana produksi. Karena kurangnya dana yang tersedia, tidak jarang petani mengalami kerugian dalam usaha pertaniannya.

3) Tekanan Penduduk

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara ke empat yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Dengan jumlah penduduk yang banyak ini, tentu memunculkan berbagai masalah di berbagai sektor, khususnya di

sektor ekonomi. Di sektor pertanian juga terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Persediaan tanah yang semakin sempit
- b) Kebutuhan pangan yang semakin tidak terpenuhi
- c) Tingkat pengangguran yang semakin tinggi, serta
- d) Masalah sosial tentang kepemilikan tanah

4) Sistem Usaha Tani

Sistem usaha tani itu sendiri mengandung pengertian pola pelaksanaan usaha tani masyarakat yang berkaitan dengan tujuannya. Secara umum, tujuan utama pertanian yang diterapkan sebagian besar petani adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pola subsisten). Hal tersebut dapat diartikan bahwa hasil pertanian tersebut belum sepenuhnya bertujuan untuk dijual ke pasar. Dengan pola pertanian yang masih subsisten ini dapat menghambat perkembangan dan kemajuan produksi.

c. Pemberdayaan Petani

Pengertian pemberdayaan petani berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (2) adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu

pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Pada bagian keenam tentang fasilitas pembiayaan dan permodalan pasal 66 dalam UU pemberdayaan petani dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani. Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian
- 2) pemberian bantuan penguatan modal bagi petani
- 3) pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- 4) pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari petani dalam menggarap lahan pertanian. Suatu hasil dari proses penggarapan lahan pertanian oleh petani ini tidak lepas dari fungsi produksi. Telah diketahui bahwa fungsi produksi adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung pada jumlah input tertentu yang dipergunakan. (C.E Bishop dan W.D. Toussaint, 1979:49). Dalam keadaan normal, input

pertanian yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Contohnya hasil panen yang melimpah dan bagus dikarenakan tanah yang subur, pemberian pupuk yang bagus, pestisida yang bagus, pengarisan yang baik, dll.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan “Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS terhadap Pemberdayaan Petani di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufida Amalia Azzahrah mahasiswa studi ekonomi syariah, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode *path analysis* dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan *Mudharabah* bagi UMKM adalah pendapatan sebelum mendapat pembiayaan *Mudharabah*, margin pembiayaan dan besaran agunan. Selain itu, hasil *path analysis* menunjukkan permintaan pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap pendapatan setelah mendapat pembiayaan *Mudharabah*. Efektivitas pembiayaan *Mudharabah* pada BMT X Jakarta dinilai secara langsung berdasarkan persepsi nasabah dan didapat hasil penilaian efektivitas pada BMT X Jakarta yang tergolong cukup efektif.

2. Penelitian dilakukan oleh Mohamad Sarifudin dari program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani, Kota Metro). Penelitian ini lebih bersifat deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dari lapangan dan didukung oleh data melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan dari BPRS Metro Madani dan nasabah pembiayaan *musyarakah* yang mengetahui secara langsung tentang permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tersebut merupakan pembiayaan yang efektif dalam hal kesesuaian antara peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Tetapi, dalam meningkatkan pendapatan nasabah pembiayaan tersebut kurang efektif karena tidak sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafar mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006 yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah terhadap Petani Agribisnis Sayuran pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor (Studi Kasus Petani Sayuran Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)”. Penelitian ini membahas tentang evaluasi penerapan efektifitas pembiayaan sistem syariah UPK Ikhtiar terhadap petani agribisnis di Desa Ciaruteun Ilir. Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengevaluasi penerapan

efektifitas pembiayaan sistem syariah UPK Ikhtiar terhadap petani agribisnis di Desa Ciaruteun Ilir. 2) Mengidentifikasi partisipasi anggota dalam mengikuti program UPK Ikhtiar dalam mempengaruhi peningkatan pembayaran angsuran dan jumlah tabungan petani agribisnis di Desa Ciaruteun Ilir. 3) Menganalisis dan merekomendasikan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan sistem syariah UPK Ikhtiar terhadap petani agribisnis di Desa Ciaruteun Ilir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ubaedillah mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul "Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)". Penelitian ini membahas tentang efektivitas pembiayaan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam pemberdayaan petani di Indonesia. Pada studi kasus ini merupakan upaya menemukan kebenaran berdasarkan data dan tidak melalui sebuah pemikiran yang kritis. Penelitian itu sendiri meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, meformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan sekurang-kurangnya, mengadakan pengujian yang hati-hati atas kesimpulan untuk menentukan apakah cocok dengan hipotesis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian difokuskan pada suatu pembiayaan yang kemudian dicari tahu keefektifannya terhadap hasil usaha maupun pendapatan nasabah. Perbedaan

penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memilih BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan agribisnis bagi masyarakat, khususnya bagi para petani. Ruang lingkup yang diambil juga tidak terlalu luas, penelitian ini mengambil tempat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil data di 2 BPRS yang ada di daerah tersebut, yaitu PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Selain yang disebutkan di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui keefektifan pembiayaan agribisnis BPRS tersebut terhadap hasil pertanian nasabah di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kerangka Berfikir

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Seperti sektor-sektor lainnya, pertanian tidak luput dari permasalahan. Menurut (Moehar Daniel : 2002) dan (Mubyarto : 1986) terdapat beberapa permasalahan dalam pertanian, salah satunya yaitu pembiayaan pertanian. Dengan keterbatasan modal dalam mengelola usaha, pelaku agribisnis kesulitan untuk meningkatkan prosuksinya. Untuk mengatasi permasalah tersebut, segala bentuk pembiayaan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dari pihak perbankan.

Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam kaitannya terhadap pembiayaan sektor pertanian, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tepat dalam mengatasi masalah pertanian diatas. Melalui

pembiayaan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sebagai balas jasa atas pembiayaan tersebut dinilai lebih meringankan pelaku agribisnis dibandingkan dengan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang hanya memiliki ruang lingkup di daerah saja. Berbeda dengan bank umum lainnya, BPRS tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS tersebut diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat, BPRS juga memberikan pembiayaan kepada pelaku agribisnis dalam mengembangkan usahanya. Untuk mengetahui pembiayaan tersebut efektif atau tidak, perlu adanya penelitian untuk mengetahuinya. Penelitian yang sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah yang mengambil setting tempat di dua PT BPRS yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Pertanyaan Penelitian

Berikut pertanyaan penelitian yang perlu dikemukakan:

1. Berdasarkan rumusan masalah 1 “Bagaimana prosedur pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, berikut pertanyaan penelitian yang diajukan kepada pihak BPRS:
 - 1) Apa saja pembiayaan yang ditawarkan BPR Syariah kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
 - 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
 - 3) Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
2. Berdasarkan rumusan masalah 2 “Bagaimana peluang dan hambatan pembiayaan agribisnis pada BPR Syariah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, berikut pertanyaan penelitian yang diajukan kepada pihak BPRS:
 - 1) Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
 - 2) Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
3. Berdasarkan rumusan masalah 3 “Bagaimana efektivitas pembiayaan agribisnis BPR Syariah terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, berikut pertanyaan penelitian:

b) Pertanyaan untuk pihak BPRS:

- 1) Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
- 2) Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
- 3) Bagaimana pengembalian pembiayaan agribisnis BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
- 4) Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

c) Pertanyaan untuk pelaku agribisnis:

- 1) Bagaimana penawaran dalam pembiayaan syariah BPR Syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
- 2) Bagaimana tahap pengajuan pembiayaan kepada BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
- 3) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pembiayaan agribisnis BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
- 4) Bagaimana pendampingan usaha oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul terhadap nasabah?
- 5) Bagaimana pelayanan pembiayaan BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
- 6) Bagaimana dampak pembiayaan agribisnis BPR Syariah di Kabupaten Bantul terhadap hasil pertanian nasabah?

7) Bagaimana dampak pembiayaan agribisnis BPR Syariah terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif. Pada penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dasta dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiono, 2015: 15).

Berdasarkan uraian teori di atas, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif melalui penelitian di dua PT BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mengungkap efektivitas pembiayaan agribisnis PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian “Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” ini akan dilakukan di Kabupaten Bantul, dengan mengambil tempat khusus yaitu

dua PT BPRS di daerah tersebut diantaranya PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Pengambilan data akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret, atau dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Sugiyono (2016: 297) menyatakan pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Subjek penelitian adalah seseorang yang bisa memberikan data atau keterangan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2016: 216) teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga. Kedua PT BPRS tersebut merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa pembiayaan kepada para pelaku agribisnis di daerah Kabupaten Bantul.
2. Nasabah dari kalangan petani di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengguna jasa pembiayaan syariah oleh PT

BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga.

Berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan, maka ditentukan subyek penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
2. PT BPRS Bangun Drajat Warga
3. Nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang menggunakan pembiayaan agribisnis
4. Nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga menggunakan pembiayaan agribisnis

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013: 225), bila dilihat dari sumber datanya, maka:

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan dan nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT Madina Mandiri Sejahtera terkait dengan pelaksanaan pembiayaan agribisnis kedua BPRS tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT Madina Mandiri Sejahtera yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan agribisnis, literatur, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2015: 308). Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiono (2015: 317) dijelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data tersebut didasarkan pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memperoleh data. Wawancara terstruktur digunakan peneliti yang

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara terstruktur ini, peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan. (Sugiyono, 2015: 319). Pertanyaan-pertanyaan wawancara ini bertuliskan poin-poin terkait rumusan masalah 1 dan 2 yaitu prosedur dan hambatan maupun peluang pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Sugiyono, 2015: 329). Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan data dokumen berupa tulisan maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

2. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2016: 305) instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Data-data dalam penelitian didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam mengambil data melalui metode tersebut, peneliti menggunakan indikator yang menjadi acuan wawancara yang disusun berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian (lihat di lampiran).

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Sugiyono (2013: 274) teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara:

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Manakala terjadi perbedaan informasi dari subjek penelitian, maka dalam teknik pemeriksaan datanya dapat menggunakan “*Cross check*”. Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data yang ada, maka akan dilakukan “*Cross check*” antara hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembiayaan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 91-99) analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Verifikasi

Langkah analisis data selanjutnya adalah penarikan kesimpuan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum BPRS Bangun Drajat Warga

a) Profil BPRS Bangun Drajat Warga

PT BPRS Bangun Drajat Warga didirikan pada tanggal 2 Februari 1994 yang berlokasi di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2015, PT BPRS Bangun Drajat Warga mendirikan kantor cabang di Bantul. Saat ini BPRS Bangun Drajat Warga sudah memiliki 1 kantor Pusat, 1 kantor cabang, dan 3 kantor Kas.

PT BPRS Bangun Drajat Warga termasuk perseroan yang memiliki maksud dan tujuan menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

b) Visi dan Misi PT BPRS Bangun Drajat Warga

PT BPRS Bangun Drajat Warga memiliki Visi Menjadikan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan

Syari'ah yang Unggul dan Terpercaya. Adapun Misi yang dicanangkan yaitu sebagai berikut:

- Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem, dan konsep perbankan syari'ah.
- Memajukan BPRS Bangun Drajat Warga dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS Bangun Drajat Warga dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar.
- Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS Bangun Drajat Warga secara layak.

c) Pemilik dan Pengurus Perusahaan PT BPRS Bangun Drajat Warga

Berdasarkan kepemilikan saham perusahaan, berikut tabel 1 daftar pemegang saham PT BPRS Bangun Drajat Warga.

No	Nama	Persentase
1	Perserikatan Muhammadiyah	58,72%
2	H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM.	12,50%
3	Drs. H. Suharno	4,00%
4	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA	2,40%
5	Ir. Hj. Dini Fitriastuti	2,20%
6	H. Sutarjo	2,15%
7	H. M. Wachid Achmadi	2,13%
8	Masyarakat Lain di Yogyakarta	15,90%
	Jumlah	100,00%

Daftar pengurus periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

I. DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Ketua : Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA

Anggota : Dr. Khairudin Hamsin, MA

II. DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Gita Danupranata, S.E., M.M.

Anggota : Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag.

III. DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Dana Suswati, SE

Direktur : Mardiyana, S.Pd

d) Jaringan Kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga

Pada tahun 2017 PT BPRS Bangun Drajat Warga memiliki 1 (satu) kantor Pusat, 1 (satu) kantor cabang, dan 3 (tiga) kantor Kas. Yakni sebagai berikut:

(1). Kantor Pusat BPRS Bangun Drajat Warga beralamat di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131, Yogyakarta.

(2). Kantor Cabang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 79, Bantul.

(3). Terdapat 3 kantor kas sebagai berikut:

(a). Kantor Kas Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sultan Agung No 14, Yogyakarta.

(b). Kantor Kas Sedayu yang beralamat di Jl. Wates KM 10, Sedayu, Bantul.

(c). Kantor Kas Ngipik yang beralamat di Manggisan Baturetno, Banguntapan, Bantul.

e) Produk PT BPRS Bangun Drajat Warga

Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, BPRS Bangun Drajat Warga memiliki dua produk layanan sebagai berikut:

(1). Produk Pendanaan

(a). Tabungan

i. Tabungan Wadiah

i. Tabungan iB ONH BDW

iB ONH BDW merupakan produk tabungan yang dikhurasukan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah.

ii. Tabungan iB IQWAM BDW

Tabungan iB IQWAM BDW adalah tabungan yang direncanakan untuk kegiatan yang direncanakan untuk masa mendatang seperti idul adha, idul fitri, atau walimahan.

iii. **Tabungan iB WADIAH BDW**

Tabungan iB WADIAH BDW adalah simpanan pihak ketiga pada Bank (Perorangan atau Badan Hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

ii. Tabungan Mudharabah

(i). Tabungan iB Usaha BDW

Tabungan ini dikelola dengan tujuan untuk investasi usaha maupun modal kerja serta operasional usaha.

(ii). Tabungan iB Pendidikan BDW

Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan tujuan untuk investasi biaya pendidikan.

(iii). Tabungan iB Ummah BDW

Tabungan ummah adalah tabungan yang bertujuan untuk investasi umum.

(iv). Tabungan iB Masjain BDW

Tabungan masjain adalah tabungan yang dikelola dengan tujuan untuk investasi yang diambil setelah masa purna tugas.

(b). Deposito

Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

i. Deposito iB BDW 1 Bulan

ii. Deposito iB BDW 3 Bulan

iii. Deposito iB BDW 6 Bulan

iv. Deposito iB BDW 12 Bulan

(2). Produk Pembiayaan

(a). Pembiayaan iB BDW Modal Kerja

BPRS BDW menyediakan 100% yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama dengan alokasi pengembangan usaha.

(b). Pembiayaan iB BDW Modal Kerja Bersama

Pembiayaan untuk modal usaha proyek/kerjasama usaha nasabah dan BPRS BDW menyediakan sesuai porsi yang dibutuhkan untuk usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama berdasarkan proporsi pendapatan (revenue sharing).

(c). Pembiayaan iB BDW Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu.

(d). Pembiayaan iB BDW Multi Jasa

Pembiayaan dengan sistem jual beli jasa/manfaat sebesar harga pokok ditambah dengan fee/jasa yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu.

(e). Pembiayaan iB BDW Sewa Beli

Pembiayaan dengan sistem sewa/sewa beli, sewa menyewa barang antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

(f). Pembiayaan Prima

Pembiayaan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada karyawan atau pegawai sebuah instansi yang asurannya dilakukan dengan potong gaji oleh instansi yang bersangkutan.

(g). Pembiayaan Talangan Umrah

Pembiayaan talangan umrah adalah pembiayaan talangan perjalanan ibadah umrah ke tanah suci.

2. Gambaran Umum BPRS Madina Mandiri Sejahtera

a) Profil PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdiri sejak tanggal 16 Januari 2008. Berdirinya BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak

lepas dari para pendiri dan pemegang saham yang pada saat itu memiliki modal awal sebesar 750 juta. Modal tersebut kemudian diserahkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk permohonan pembukaan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Setelah pengajuan, BPRS Madina Mandiri Sejahtera mendapatkan izin beroperasi dari Bank Indonesia pada tanggal 8 November 2007 dengan No 9/57/KEP.GBI/2007, dengan Akta Pendirian dari Notaris Wahyu Wiryono No 24 tanggal 7 Februari 2007, serta SK Menhumkam RI No. W22-00151 HT.01.01-TH.2007.

b) Visi dan Misi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki Visi Menjadi BPR Syariah Terdepan dalam Membangun Ekonomi Umat. Adapun Misi yang dicanangkan yaitu sebagai berikut:

- (1). Memberikan layan produk perbankan syariah berdasarkan *asas prudential banking*
- (2). Berperan aktif dalam sektor usaha kecil dan menengah
- (3). Menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah

c) Pemilik dan Pengurus Perusahaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berdasarkan kepemilikan saham perusahaan, berikut adalah tabel 2 daftar pemegang saham PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

No	Nama
1	H. Ari Tri Priyono, ST
2	H. Anwar Wahyudi, SE, MM
3	H. Ahmad Sumiyanto, SE, M.Si
4	Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA
5	Tedy J. Sitepu
6	Ir. Ariel Budiono

Daftar pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

I. DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
 Anggota : H. Ahmad Khudori, Lc

II. DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : H. Anwar Wahyudi, SE, MM
 Anggota : Prof. Dr.H. Amir Muallim, MA

III. DIREKTUR

Direktur : Sabdo Nugroho, S.P

d) Jaringan Kantor PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Pada tahun 2017 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki 1 (satu) kantor Pusat dan 1 (satu) kantor cabang sebagai berikut:

- (1). Kantor Pusat BPRS Madina Mandiri Sejahtera berlokasi di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon-Bantul, Yogyakarta.
- (2). Kantor Kas berlokasi di Cagunan, 199/Trimurti Srandakan, Bantul.

e) Produk PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki dua produk layanan sebagai berikut:

(1). Produk Pendanaan

(a). Tabungan

i. TabunganKu iB Wadiyah

Tabungan khusus untuk pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal Rp10.000, setoran selanjutnya Rp1000 dan bebas biaya administrasi. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam pelayanan kas.

ii. Tabungan iB Madina

Tabungan khusus perorangan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya, dengan setoran minimal Rp10.000.

iii. Tabungan iB Madina Lembaga

Tabungan khusus bagi lembaga/badan dengan setoran awal Rp100.000 dan setoran selanjutnya Rp25.000.

iv. Tabungan iB Hari Raya

Tabungan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp25.000. Tabungan ini

menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Penarikan hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri atau waktu bulan Ramadhan.

v. Tabungan iB Qurban

Tabungan untuk persiapan pembelian hewan kurban (Idul Adha), dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp25.000. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Penarikan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun yaitu secepat-cepatnya 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Adha.

vi. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan khusus untuk persiapan pendidikan, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp25.000. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, misal, setiap akhir

semester, setiap akhir tahun ajaran baru, atau pada tahun tertentu.

vii. Tabungan iB Walimah

Tabungan khusus untuk persiapan walimah, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp25.000. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank. Penarikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu menjelang pernikahan, penarikan sekaligus menutup rekening Tabungan Walimah.

viii. Tabungan iB Umrah/Haji

Tabungan khusus untuk dana perjalanan haji/umroh, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp100.000. Penarikan (diluar pencairan saat pendaftaran/ pembayaran haji/ umroh) hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 tahun sebesar maksimal 50% dari saldo mengendap. Nisbah bagi hasil yang digunakan yaitu setara deposito 12 bulan.

ix. Tabungan Arisan Madina

Tabungan arisan ini menggunakan prinsip syariah dengan iuran perbulan sebesar Rp100.000 selama 36 bulan dengan jumlah peserta 100 per kelompok.

(b). Deposito

(a). Deposito Berjangka

Deposito berjangka 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

(b). Deposito Madina Sejahtera

Deposito yang memiliki jangka waktu 24 bulan.

(b). Produk Pembiayaan

(1). Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini untuk membantu kebutuhan modal kerja serta mendukung kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha. Akad yang digunakan adalah musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja

(2). Pembiayaan Investasi

Produk pembiayaan dengan prinsip murabahah ini membantu kebutuhan akan investasi usaha, seperti pembelian gedung, properti, dll.

(3). Pembiayaan Konsumtif

Produk pembiayaan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif seperti

pembelian barang konsumsi, kendaraan, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dsb. Akad yang digunakan yaitu akad murabahah, ijarah, ataupun multijasa.

B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian pada BAB II, berikut hasil penelitian yang dapat dituliskan.

1. Prosedur Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul

PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera merupakan BPRS di Bantul, DIY yang sudah terdaftar di OJK. Sebagai lembaga keuangan yang tugasnya menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat, kedua BPRS ini memiliki produk pendanaan berupa tabungan ataupun deposito, dan produk penyaluran dana berupa pembiayaan.

Produk pembiayaan yang ditawarkan PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera ditawarkan pada semua masyarakat dan segala sektor pelaku ekonomi di Kabupaten Bantul. Sektor pelaku ekonomi yang menggunakan pembiayaan di kedua BPRS tersebut diantaranya adalah sektor perdagangan, kontraktor, agribisnis, jasa, maupun konsumsi. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Wakhid Hasyim, S.E. selaku kepala bagian pembiayaan di PT BPRS Bangun Drajat Warga. Berikut pernyataannya.

“Nasabah terdiri dari sektor perdagangan dan konsumtif, banyak di bagian murabahahnya. Sektor perdagangan dengan akad murabahah diatas 50%. Ada juga yang dari sektor agribisnis, namun presentasenya sangat kecil.”

Pernyataan pendukung lainnya disampaikan oleh Bapak Sigit Junaedi, S.E selaku *GM Marketing* di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Berikut pernyataannya.

“Untuk lendingnya memang madina syariah termasuk yang terbesar, jadi relatif lebih merata di berbagai jenis sektor ekonomi. Salah satunya yaitu kita membiayai kontraktor, sektor agribisnis, sektor jasa, sektor perdagangan.”

Sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, pada tahun 2015 hingga tahun 2017 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki konsistensi kenaikan realisasi pembiayaan. Pada tahun 2017, bank tersebut berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp27.102.435.216 kepada masyarakat sekitar. Pernyataan ini dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Tahun 2015 s.d. 2017**

Tahun	Target Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)
2015	Rp 9.600.000.000	Rp 11.547.900.000
2016	Rp 9.600.000.000	Rp 16.935.500.000
2017	Rp 9.600.000.000	Rp 27.102.435.216

Sumber: PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berbeda dengan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, PT BPRS Bangun Drajat Warga memiliki nominal lebih besar dalam realisasi pembiayaan. Pada tahun 2015 dan 2016, target pembiayaan yang ditetapkan belum semuanya tersalurkan kepada masayarakat. Namun pada tahun 2017, target pembiayaan sudah semuanya disalurkan

kepada masyarakat sebesar Rp66.938.435.692. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Realisasi Pembiayaan
PT BPRS Bangun Drajat Warga
Tahun 2015 s.d. 2017**

Tahun	Target Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)
2015	Rp 49.203.978.000	Rp 46.576.999.000
2016	Rp 67.281.246.000	Rp 59.134.177.000
2017	Rp 66.938.195.000	Rp 66.938.435.692

Sumber: PT BPRS Bangun Drajat Warga

Pembiayaan yang ditawarkan pada sektor agribisnis tersebut hampir sama dengan produk pembiayaan yang ditawarkan dengan sektor lainnya. Pembiayaan yang diberikan pada pelaku agribisnis untuk mengembangkan usahanya yaitu pembiayaan modal kerja atau modal usaha dengan akad mudharabah, murabahah, maupun musyarakah. Berikut tabel yang menunjukkan jenis akad yang digunakan.

**Tabel 5. Jenis Akad Pembiayaan Sektor Agribisnis di PT BPRS
Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga**

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera			PT BPRS Bangun Drajat Warga		
No	Jenis Akad	Persentase	No	Jenis Akad	Persentase
1	Mudharabah	7,14	1	Mudharabah	100,00
2	Murabahah	50,00			
3	Musyarakah	42,86			
	Total	100,00		Total	100,00

Sumber: BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan Bangun Drajat Warga

Berdasarkan tabel 5 di atas, jenis akad yang paling banyak digunakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu murabahah

sebesar 50%, sedangkan semua nasabah agribisnis pada PT BPRS Bangun Drajat Warga menggunakan akad mudharabah. Murabahah diartikan sebagai perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, biasanya nasabah menggunakan akad ini sebagai investasi peralatan usaha yang diperlukan. Berbeda halnya dengan akad mudharabah adalah akad yang digunakan untuk nasabah yang menginginkan modal usaha dengan mengelola sendiri usaha tersebut. Akad musyakarah itu sendiri diartikan bank sebagai pemberi modal dan juga ikut serta dalam mengelola usaha.

Perbedaan pembiayaan agribisnis dengan pembiayaan sektor lainnya yaitu terletak pada jangka waktu pembiayaan tersebut. Dalam sektor ini dikenal dengan sistem sebrakan yaitu jangka waktu pembiayaan hanya 4 atau s.d. 6 bulan dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Angsuran yang dimaksudkan di sini yaitu nasabah diperbolehkan hanya mengangsur bagi hasil saja setiap bulannya, sedangkan uang pokok dibayar di akhir waktu angsuran yaitu setelah panen. Pemberlakuan sistem sebrakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku agribisnis, mengingat hasil dari sektor agribisnis baru bisa didapatkan setelah panen. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Hidayat selaku kepala cabang PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut.

“..... Uniknya di agribisnis, kita biayai dari panen ke panen, dengan sistem sebrakan yaitu hanya 4 bulan.”

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Novie, S.H. selaku *Legal Officer* PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berikut ini.

“..... jangka waktunya tidak lama, biasanya bulan 1 s.d 5 bagi hasil, kemudian bulan ke 6 bagi hasil dan pokoknya. Hal ini biasanya disebut dengan sistem sebrakan.”

Dalam pengajuan pembiayaan agribisnis terdapat sayarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah. Persyaratan adiminstratif yang disyaratkan kepada calon nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak jauh berbeda, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1) Persyaratan Administratif Pembiayaan Sektor Agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga

Berikut persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon nasabah agribisnis perorangan atau individu.

- a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- b) Fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga
- c) Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- d) Fotocopy NPWP
- e) Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- f) Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun & 3 bulan terakhir

- g) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan / rekening koran 3 bulan terakhir
- h) Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- i) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
- j) Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Berikut persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon nasabah agribisnis perusahaan atau instansi.

- a) Surat permohonan pemberian pembiayaan dari manajemen/pengurus
- b) NPWP institusi yang masih berlaku
- c) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
- d) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- e) Data-data pengurus perusahaan
- f) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- g) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
- h) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)

- i) Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

2) Persyaratan Administratif Pembiayaan Sektor Agribisnis PT BPRS Madina Mandiri sejahtera

Berikut persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon nasabah agribisnis.

- a) Foto Copy KTP Pemohon
- b) Foto Copy KTP Suami / Isteri
- c) Foto Copy Kartu Keluarga / C1
- d) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- e) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- f) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll).

Secara umum prosedur pembiayaan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sama dengan prosedur pembiayaan untuk semua nasabah dari segala sektor. Prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga yaitu sebagai berikut:

1. Calon nasabah mangajukan permohonan pembiayaan ke kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga
- Calon nasabah datang langsung ke BPRS Bangun Drajat Warga untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen

yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan pembiayaan *musyarakah*.

2. Pengecekan berkas administrasi calon nasabah

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan semua berkas telah terpenuhi, tahap selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen yang telah diajukan oleh calon nasabah. Tujuan dari penyelidikan berkas ini untuk mengetahui kebenaran dan keaslian yang diberikan oleh calon nasabah.

3. Survey lapangan

PT BPRS Bangun Drajat Warga menggali informasi dan melakukan survey lapangan tempat nasabah atau meninjau kantor nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan tempat yang dibiayai sesuai dengan formulir yang diisi saat pendaftaran.

4. Pengajuan Memorandum Analisis Pembiayaan

Pengajuan memorandum analisis pembiayaan dilakukan oleh *account manager* kepada JM marketing atau director marketing, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju.

5. Akad

Jika komite memutuskan setuju memberikan pembiayaan maka tahap selanjutnya yaitu akad yang dilakukan oleh pihak

bank dan calon nasabah. Akad yang digunakan yaitu mudharabah atau musyarakah sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.

6. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan bersamaan dengan akad. Lama atau tidaknya proses pencairan dana tergantung pada kelengkapan dokumen pihak nasabah. Nasabah yang sebelumnya sudah pernah melakukan pemberian biasanya hanya memerlukan waktu 1 hari untuk pencairan dana. Hal tersebut dikarenakan data yang dimiliki sudah lengkap.

7. Pemantauan nasabah

Pemantauan nasabah dilakukan selama jangka waktu angsuran. Pemantauan yang dilakukan antara lain pemantauan usaha nasabah, jaminan, dan pemantauan pembayaran nasabah.

8. Pelunasan Pemberian

Apabila nasabah tersebut telah menyelesaikan kewajibannya terhadap fasilitas pemberian yang telah diterima dan menyelesaikan seluruh administrasi, maka pihak BPRS mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada pihak BPRS.

Prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan

Calon nasabah datang langsung ke BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan pembiayaan.

2. *BI Cecking* atau SID

BI Checking itu sendiri adalah informasi catatan mengenai lancar atau macetnya pembayaran kredit (*kolektibilitas*) yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Perlu diketahui, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang berisikan informasi debitur serta fasilitas kreditnya untuk dipertukarkan ke sesama lembaga keuangan. Melalui *BI Checking* atau SID ini bank dapat melihat dan menilai karakteristik dari calon debitur.

3. Survey lapangan

Dalam tahap ini, marketing melakukan survey ke lapangan dan mengcroscek data yang sudah ada dengan data yang ada di lapangan. Croscek data dilakukan dengan menggunakan aspek 5C + 1S. Berikut penjelasannya:

- *Character*

Karakter dari calon debitur sendiri dapat dilihat kesesuaian antara hasil BI Checking atau SID dengan wawancara langsung.

- *Capacity*

Aspek ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan calon debitur dalam membayar. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangannya.

- *Collateral*

Untuk menilai aspek *collateral* calon debitur bisa dilihat dari jaminan yang digunakan, apakah dengan jaminan yang diberikan bisa mencover plafond yang diajukan atau tidak.

- *Condition of economic*

Aspek ini bisa dilihat melalui kondisi usaha yang sedang dijalankan, apakah usahanya lancar atau mengalami kesulitan.

- *Capital*

Aspek capital ini bisa dilihat dari modal yang dimiliki oleh calon debitur, baik itu kepemilikan barang pribadi maupun kepemilikan usaha.

- *Syariah*

Prinsip syariah merupakan landasan utama dalam menjalankan pembiayaan.

4. Pengajuan Memorandum Analisis Pembiayaan

Pengajuan memorandum analisis pembiayaan dilakukan oleh *account manager* kepada *JM marketing* atau *director marketing*, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju.

5. Pengecekan keabsahan data

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui *JM marketing* atau *director marketing* maka berkas-berkas calon debitur di cek keabsahan datanya oleh *legal officer*.

6. Akad

Akad akan dilaksanakan setelah datanya dinyatakan tidak bermasalah oleh *legal officer*. Jenis akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan itu sendiri.

7. Pencairan dana

Pencairan dana dapat dilakukan bersamaan dengan akad dan jika data-data yang diperlukan sudah lengkap. Dalam proses pencairan dana ini BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki target 5 hari cair. Berbeda dengan nasabah yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan, biasanya hanya memerlukan waktu 1 hari untuk pencairan dana.

8. Pemantauan nasabah

Pemantaun nasabah dilakukan setelah pencairan pembiayaan. Pemantaun yang dilakukan antara lain pemantaun usaha nasabah, jaminan, dan pemantauan pembayaran nasabah.

9. Pelunasan Pembiayaan

Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera, apabila nasabah tersebut telah menyelesaikan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan menyelesaikan seluruh administrasi, maka pihak BPRS mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada pihak BPRS.

PT BPRS Bangun Drajat warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak melakukan pembinaan usaha secara teknis pengelolaan usaha agribisnis pada nasabah melainkan melakukan pembinaan dalam aspek keuangan usaha. Hal ini dikarenakan tidak adanya sumberdaya yang mendukung untuk memberikan pembinaan pada nasabah agribisnis. Pembinaan dalam aspek keuangan yang dimaksud yaitu pihak BPRS melakukan kunjungan ataupun silaturrahmi yang dilakukan oleh pihak AO bank ke nasabah agribisnis. Melalui kunjungan ini pihak bank dapat memantau maupun membantu menyelesaikan permasalahan keuangan maupun masalah lainnya yang sedang dihadapi oleh nasabah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wakhid

Hasyim, S.E. selaku kepala bagian pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut.

“Adanya pembinaan seperti silaturrahmi ke nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah. Tidak ada pembinaan secara teknis pertanian karena memang tidak ada sumberdaya yang memadai.”

Pernyataan pendukung lainnya disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku kepala cabang PT BPRS Bangun Drajat Warga berikut ini.

“Jadi pembinaan terhadap nasabah ada. Pembinaan disini lebih kepada pembinaan keuangan, jadi lebih ke silaturrahmi. Hal ini untuk mengetahui masalah yang dialami nasabah kemudian kita membantu untuk mencari solusi. Untuk pembinaan secara manajerial atau pengelolaan usaha memang tidak ada.”

Pernyataan pendukung pihak PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera disampaikan oleh Bapak Sigit Junaedi, S.E selaku *GM Marketing* sebagai berikut.

“Sampai saat ini sih tidak ada pembinaan secara teknis pengelolaan usaha agribisnis, kita hanya sekedar silaturrahmi untuk tau bagaimana kondisi usaha, ada masalah atau tidak. Kita tidak menilai dari segi agribisnisnya tapi kita lebih lihat bagaimana atau kemampuan bayar nasabah itu sendiri.”

Pembiayaan agribisnis ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil yang sudah ditentukan terlebih dahulu nisabah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bagi bank, proses perhitungan nisbah bagi hasil dinamakan dengan proyeksi. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Sigit Junaedi, S.E, *GM Marketing* PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera di bawah ini.

“Bagi hasilnya mengikuti nisbah yang diikuti di awal, tetapi dalam penentuan nisbah ada proses perhitungan dari bank atau yang disebut proyeksi.”

Proyeksi penentuan nisabah bagi hasil didapatkan dari hasil wawancara dan analisa keuangan nasabah. Pada proses proyeksi ini, sering kali bank memiliki kendala dalam menganalisis keuangan nasabah. Hal ini dikarenakan nasabah tidak terbuka dengan laporan keuangan mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, bank memiliki solusi dengan menggunakan pendekatan prakiraan pada saat wawancara. Pernyataan di atas dikuatkan oleh pernyataan Bapak Nur Hidayat, Kepala Kantor Cabang PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut.

“Rata-rata selama ini dalam menentukan nisbah, kesulitannya yaitu nasabah tidak memiliki laporan keuangan. Kenyataan nasabah belum terlalu terbuka untuk menyampaikan masalah laporan keuangan. Untuk menentukan nisbah yaitu melalui perkiraan. Solusinya yaitu menggunakan pendekatan prakiraan saat wawancara.”

2. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Agribisnis pada BPRS di Kabupaten Bantul

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian suatu negara. Melalui sektor ini, kebutuhan pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi. Sektor ini sangat bergantung terhadap kondisi geografis tempat usaha, baik itu iklim maupun cuaca. Tidak jarang pelaku agribisnis mengalami gagal panen yang disebabkan kondisi iklim maupun cuaca yang kurang baik.

Sebagai pelaku perekonomian suatu negara, pelaku usaha agribisnis memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Melihat hal tersebut BPRS masuk ke ranah sektor ini, khususnya BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang ada di Kabupaten Bantul. Bersumber dari resiko usaha yang dihadapi sektor agribisnis ini, kedua BPRS tersebut melihat peluang dalam membiayai sektor tersebut. Penyaluran pembiayaan tersebut didasari dengan prinsip membantu perekonomian ummat, seperti yang disampaikan Bapak Sigit Junaedi, S.E selaku *GM Marketing* BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dan prinsip membiayai semua sektor pelaku usaha yang disampaikan Bapak Nur Hidayat selaku Kepala Cabang BPRS Bangun Drajat Warga.

Dalam menyalurkan pembiayaan agribisnis kepada masyarakat perlu adanya strategi marketing yang menarik. Pada PT BPRS Bangun Dajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera mempromosikan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Promosi secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media sosial, salah satunya yaitu facebook, instagram, whatsapp, maupun web site. Promosi secara langsung diaantaranya yaitu promosi yang dilakukan oleh AO atau bagian marketing bank kepada masayarakat, promosi yang dilakukan nasabah *existing* kepada teman bisnisnya, dan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat sosialisasi pembiayaan agribisnis kepada kelompok-

kelompok tani ataupun agribisnis. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Wakhid Hasyim S.E, kepala bagian pemberian sebagai berikut.

“Promosi lewat medsos dan AO terjun langsung ke lapangan untuk mencari nasabah.”

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Ibu Novie S.H. selaku *legal officer* dan Bapak Sigit Junaedi, S.E. selaku *GM Marketing* BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Berikut pernyataannya.

“Promosinya yaitu dengan cara sosialisasi ke kelompok-kelompok tani, person to person.”

“Promosi salah satunya dari nasabah existing, dan dari pihak marketing itu sendiri. Kalau media promosi yaitu website, semua media sosial, brosur, dan juga video profil.”

Selain peluang untuk masuk ke sektor agribisnis, BPRS mendapati kendala-kendala dalam pemberian usahanya. Berikut hambatan-hambatan dalam pemberian agribisnis di Kabupaten Bantul.

1) Sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko
Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh cuaca maupun iklim. Seringkali pelaku usaha mengalami gagal panen ketika kondisi cuaca dan iklim tidak bagus. Hal tersebut dialami oleh salah satu nasabah PT Bangun Drajat Warga yang bermata pencaharian sebagai peternak ayam. Berikut ulasannya.

“Kondisi ternak yang tidak bagus disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, yaitu terlalu panas, atau terlalu dingin.

Contohnya pada bulan November cuaca ekstrim yg menimbulkan banjir dan pemandaman yang lumayan lama menyebabkan ternak banyak yang mati, akhirnya kami mengalami kerugian.”

Hal serupa juga dialami oleh nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani melon. Berikut pernyataan nasabah.

“Dulu pernah mengalami gagal panen karena cuacanya yang tidak mendukung. Jadi saya rugi.”

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPRS sebagai pemilik modal mempunyai strategi penyaluran pemberian modal. BPRS membiayai nasabah agribisnis yang mempunyai sumber pendapatan lain selain dari hasil usaha dibidang agribisnis. Dengan adanya sumber pendapatan lain tersebut dapat *memback-up* pokok yang harus dibayarkan ketika usaha agribisnis mengalami kerugian. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Nur Hidayat PT BPRS Bangun Drajat Warga dan Bu Novie, S.E, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai berikut.

“Untuk memback up keamanan tersebut yaitu perlu nasabah yang memiliki sumber pengembalian lain selain sumber agribisnis.”

“Hambatannya lebih ke bencana alam, karena pertanian memang sangat dipengaruhi sekali dengan alam. Biasanya memang kita ambil nasabah yang tidak hanya budidaya di bidang pertanian saja namun ada usaha lainnya yang dapat mencover pengembaliannya.”

2) Lamanya waktu usaha di bidang agribisnis

Dalam sektor agribisnis, selama ini waktu dianggap menjadi masalah dalam proses produksi karena lamanya menunggu. Mulai dari proses pembibitan hingga pada waktu memperoleh hasil. Jika dibidang pertanian, umur padi mulai dari benih sampai panen mencapai empat bulan, petani harus menunggu sambil merawat tanamannya hingga sedemikian rupa. Hal ini tidak jauh pula dari bidang peternakan dan perkebunan, semuanya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil. Maka dari itu, jika berbicara mengenai agribisnis maka hal tersebut tidak lepas dari alam, dan butuh waktu sesuai dengan ciptaan yang Maha Kuasa.

3) Sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar

Dalam sektor agribisnis ini memerlukan input diantaranya yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida maupun obat-obat lainnya, dan tenaga kerja. Keseluruhan input tersebut memerlukan biaya yang besar dan harga setiap unitnya semakin mahal. Pada nasabah petani padi, proses penanaman hingga panen bisa memerlukan biaya sebesar 8 juta s.d 9 juta per ha dengan keuntungan hasil panen kurang lebih sebesar 12 juta per ha.

Hal ini disampaikan oleh nasabah petani PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut.

“Biaya tanam padi s.d panen 8jt-9jt/ha.”

“Keuntungan tanaman padi sekali panen. Setiap 100 lobang atau 1000 m laba 1,2 juta dg kepemilikan seluas 5000 m, jadi laba sekali panen kurang lebih 6 juta.”

- 4) Orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit

Semakin berkembangnya zaman, sektor pertanian mulai tidak diminati, terlebih persentase tenaga kerja tua lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja usia muda. Berikut pernyataan Bapak Nur Hidayat dari PT BPRS Bangun Drajat mengenai hal tersebut.

“dari pihak BDW jika langsung masuk dalam sektor agribisnis banyak yang dikhawatirkan yaitu modal besar, orang yang bercimpung di sana semakin lama semakin sedikit, meskipun ada pasti memerlukan biaya yang tinggi.”

3. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul terhadap Hasil Usaha Nasabah

Pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera menyalurkan dana kepada berbagai sektor di masyarakat, salah satunya yaitu sektor agribisnis. Namun telah diketahui pada bagian sebelumnya bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku agribisnis tidaklah banyak. Berikut Tabel 6 yang menunjukkan presentase pembiayaan agribisnis.

Tabel 6. Presentase Pembiayaan Agribisnis BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Per 2017

No	Nama BPRS	Pembiayaan	Pembiayaan Agribisnis	%
1	PT BPRS Bangun Drajat Warga	Rp 66.938.435.692	Rp 101.000.000	0,15
2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Rp 27.102.435.216	Rp 701.500.000	2,59
	Total	Rp 94.040.870.908	Rp 802.500.000	0,85

Sumber: PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 presentase penyaluran pembiayaan agribisnis kedua BPRS tersebut di bawah 1% yaitu 0,85% dari jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga, pembiayaan yang agribisnis yang dapat disalurkan yaitu Rp101.000.000 dengan presentase 0,15%, sedangkan presentase pembiayaan agribisnis pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebesar 2,59% dengan total uang sebesar Rp802.500.000.

Untuk penjabaran lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 yang menyajikan data nasabah agribisnis yang menggunakan pembiayaan di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Berikut Tabel 7 dan Tabel 8 di bawah ini.

**Tabel 7. Data Nasabah Agribisnis yang Menggunakan Pembiayaan
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Per 2017**

No	Nama	Akad	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu	Plafond (Rp)	Lokasi Usaha	Jenis Usaha	Omset	
								Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
1	A	Mudharabah	Modal Kerja	12	Rp 30.000.000	Magelang	Pertanian	Rp 76.580.000	Rp 108.300.000
2	B	Musyarakah	Modal Kerja	6	Rp 50.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 55.000.000	Rp 63.000.000
3	C	Murabahah	Modal Kerja	36	Rp 80.000.000	Bantul	Pertanian	Rp 27.000.000	Rp 75.000.000
4	D	Murabahah	Modal Kerja	60	Rp 150.000.000	Palembang	Perkebunan	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000
5	E	Murabahah	Modal Kerja	60	Rp 87.000.000	Magelang	Pertanian	Rp 108.000.000	Rp 184.100.000
6	F	Murabahah	Modal Kerja	12	Rp 6.000.000	Bantul	Pertanian	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
7	G	Murabahah	Modal Kerja	36	Rp 120.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 150.000.000	Rp 340.000.000
8	H	Musyarakah	Modal Kerja	6	Rp 23.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 126.000.000	Rp 150.000.000
9	I	Musyarakah	Modal Kerja	6	Rp 20.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 55.000.000	Rp 66.000.000
10	J	Musyarakah	Modal Kerja	6	Rp 7.500.000	Bantul	Pertanian	Rp 12.000.000	Rp 18.250.000
11	K	Musyarakah	Modal Kerja	4	Rp 12.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000
12	L	Musyarakah	Modal Kerja	6	Rp 16.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000
13	M	Murabahah	Modal Kerja	60	Rp 50.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000

14	N	Murabahah	Modal Kerja	36	Rp 50.000.000	Gunungki dul	Perkebunan	Rp 66.000.000	Rp 75.000.000
----	---	-----------	-------------	----	---------------	-----------------	------------	---------------	---------------

Sumber: PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

**Tabel 8. Data Nasabah Agribisnis yang Menggunakan Pembiayaan
PT BPRS Bangun Drajat Warga
Per 2017**

No	Na ma	Akad	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu (bln)	Plafond (Rp)	Lokasi Usaha	Jenis Usaha	Omset		Lama Menjadi Nasabah di BDW
								Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	
1	A	Mudharabah	Modal Kerja	4	Rp 2.000.000	Bantul	Pertanian	Rp 6.500.000	Rp 42.750.000	1997 s.d. 2017
2	B	Mudharabah	Modal Kerja	6	Rp 9.000.000	Bantul	Peternakan	Rp 2.500.000	Rp 10.000.000	2011 s.d. Sekarang
3	C	Mudharabah	Modal Kerja	12	Rp 15.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 30.000.000	Rp 41.180.000	1994 s.d. Sekarang
4	D	Mudharabah	Modal Kerja	20	Rp 50.000.000	Bantul	Pertanian	Rp 230.000.000	Rp 251.000.000	1996 s.d. Sekarang
5	E	Mudharabah	Modal Kerja	12	Rp 25.000.000	Kulon Progo	Pertanian	Rp 60.000.000	Rp 76.000.000	1998 s.d. 2017

Sumber: PT BPRS Bangun Drajat Warga

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang menggunakan pemberian agribisnis terdapat 14 orang. Lokasi usaha nasabah juga tidak hanya di Yogyakarta, namun ada pula yang berlokasi di luar Yogyakarta dan di luar Jawa seperti Magelang dan Palembang. Nasabah agribisnis ini biasanya hanya menekuni dan mengembangkan 1 jenis sektor agribisnis diantaranya adalah peternakan, pertanian, atau perkebunan.

Nasabah agribisnis menggunakan pemberian modal kerja dengan akad mudharabah, musyarakah, maupun murabahah sesuai dengan kebutuhan pemberian. Jangka waktu peminjaman dari yang paling singkat yaitu 4 bulan hingga yang paling lama yaitu 60 bulan. Plafond yang diajukan yaitu dari paling rendah Rp6.000.000 hingga yang paling tinggi yaitu sebesar Rp150.000.000. Plafond yang diajukan oleh peternak yaitu kisaran Rp6.000.000.000 s.d. Rp87.000.000. Kisaran plafond yang diajukan oleh petani sebesar Rp12.000.000 s.d. Rp80.000.000, plafond yang diajukan oleh nasabah perkebunan berkisar Rp50.000.000 s.d. Rp150.000.000.

Tabel 7 menunjukkan bahwa omset setelah pemberian nasabah agribisnis mengalami peningkatan. Omset awal yang paling rendah sebesar Rp2.000.000 meningkat menjadi Rp.4.000.0000, sedangkan nasabah dengan omset sebelum pemberian sebesar Rp200.000.000 meningkat menjadi Rp250.000.000. Presentase peningkatan omset

tertinggi sebesar 64% dari sektor pertanian dan terendah pada sektor perkebunan dengan presentase peningkatan sebesar 12%.

Berbeda halnya dengan data nasabah pembiayaan agribisnis pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, PT BPRS Bangun Drajat Warga memiliki 5 nasabah agribisnis pada tahun 2017, namun nasabah tersebut merupakan nasabah yang sudah lama menggunakan produk pembiayaan di BPRS tersebut. Komposisi nasabah dibidang pertanian 4 orang yang telah menjadi nasabah sejak tahun 1990an dan peternakan 1 orang yang mulai menjadi nasabah sejak tahun 2011. Lokasi agribisnis mereka terletak di daerah Bantul dan Kulon Progo. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 8 terkait data nasabah agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga.

Jenis penggunaan dana mereka yaitu untuk modal kerja dengan akad mudharabah. Plafond yang diajukan juga tidak sebesar pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu kisaran Rp2.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 dengan jangka waktu angsuran 4 sampai 20 bulan. Jika dilihat pada omset nasabah, omset nasabah setelah menggunakan pembiayaan mengalami peningkatan. Presentase peningkatan tersebut sebesar 17% hingga 85% dari omset awal sebelum pembiayaan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disajikan di atas, berikut pembahasan yang dapat dituliskan.

1. Prosedur Pembiayaan Agribisnis PT BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Prosedur pembiayaan secara ringkas dibagi menjadi 3 yaitu pengajuan pembiayaan, pencairan dana, dan pengembalian dana. Berikut ulasannya.

a Tahap pengajuan pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tahap pengajuan pada PT BPRS Madina Mandiri sejahtera terdiri dari nasabah mengisi form pembiayaan di BPRS, BI *Checking*, dan survey lapangan. Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga tahap pengajuan pembiayaan agribisnis terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pengecekan berkas administrasi calon nasabah, dan survey lapangan.

Pada tahap pengajuan pembiayaan agribisnis terdapat prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPRS untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Seluruh anggota yang hendak mengajukan pembiayaan agribisnis di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan BPRS Bangun Drajat Warga diharuskan untuk memenuhi segala prosedur yang diberlakukan BPRS seperti diawali dengan pengisian formulir pembiayaan dan selanjutnya

melengkapi administrasi. Sebagian besar nasabah yang menggunakan pemberian agribisnis mengatakan bahwa prosedur pemberian BPRS mudah dan cepat prosesnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan nasabah agribisnis, Bu Mujiyem, sebagai berikut.

“Tidak ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, karena ada AO yang mengarahkan dalam memenuhi persyaratan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Mursidah dan Pak Sumajo sebagai berikut.

“Tahap pengajuan mudah, karena dipandu oleh AO atau Bank.”

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa nasabah agribisnis, dapat dikatakan bahwa tahap pengajuan pemberian sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa semua subjek penelitian mengatakan bahwa tahap pengajuan pemberian agribisnis mudah karena dari pihak BPRS membantu memandu calon nasabah untuk melengkapi persyaratan administratif. Begitu pula pihak BPRS menyalurkan pemberian kepada nasabah agribisnis dengan melakukan berbagai analisis, salah satunya yaitu *BI Checking*, survey lapangan, dan analisis keabsahan data. Hal ini tentunya dapat membantu pihak bank dalam meningkatkan sistem keamanannya yaitu dengan menyalurkan pemberian agribisnis kepada nasabah yang tepat.

b Tahap pencairan dana

Sebelum tahap pencairan dana, pengajuan pembiayaan agribisnis PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga akan dianalisis kelayakan untuk mendapat pembiayaan. Proses kelayakan ini dilakukan setelah survey lapangan, setelah itu bagian *account manager* mengajukan memorandum analisis pembiayaan kepada JM marketing atau director marketing, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju.

Setelah proses analisis memorandum disetujui oleh komite, maka proses akad dan pencairan dana dapat dilakukan. Proses pencairan pembiayaan dapat diusahakan BPRS dalam waktu yang sesingkat mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS, waktu yang diperlukan untuk pencairan dana pembiayaan adalah satu sampai tujuh hari dari pengajuan pembiayaan. Namun hasil lapangan menemukan rata-rata waktu pencairan dana pembiayaan adalah antara satu sampai lima hari setelah pengajuan pembiayaan. Pada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan sebelumnya, pencairan dana lebih cepat yaitu bisa 1 hari cair karena data administrasi yang sudah ada cukup untuk diperbaharui saja. Berbeda halnya nasabah baru yang ingin mengajukan pembiayaan, mereka harus memenuhi

persyaratan administratif dan tahapan pengajuan pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pihak BPRS. Biasanya pada nasabah agribisnis yang baru, waktu pencairan dana sekitar 4 s.d 5 hari.

Berikut hasil wawancara dengan Bu Mjiyem.

“Tahap pengajuan pembiayaan yang cepat yaitu 5 hari sudah bisa cair.”

Berikut pula pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sumarjo.

“Mudah, 1 hari bisa cair karena merupakan nasabah lama.”

Berdasarkan target pencairan dana yang direncanakan oleh pihak bank yaitu selama tujuh hari setelah pengajuan pembiayaan dengan hasil penelitian di lapangan 1 sampai dengan 5 hari cair, maka dapat dikatakan bahwa tahap pencairan dana sudah berjalan dengan baik. Tahap pencairan dana dikatakan sudah berjalan dengan baik karena hasil yang dicapai telah memenuhi target. Hal ini sesuai teori yang disampaikan oleh Ahmad Sofan Anshor (2016: 16) yang mengartikan efektivitas sebagai upaya dalam mencapai tujuan (*doing the right things*) atau ukuran perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai. Begitu pula sesuai dengan pendapat Ismail Solihin dalam bukunya *Pengantar Manajemen* yang menjelaskan bahwa kegiatan manajemen dikatakan efektif jika kegiatan manajemen tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c Tahap pengembalian dana

Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan BPRS Bangun Drajat Warga, jangka waktu angsuran untuk pengembalian pembiayaan agribisnis ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BPRS dengan nasabah. Kedua BPRS tersebut melakukan penawaran jangka waktu kemudian anggota yang menilai apakah mampu mengangsur dengan waktu yang ditawarkan dan anggota dapat menentukan jangka waktu angsuran berdasarkan kesepakatan dengan BPRS sehingga penetapan jangka waktu diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.

Uniknya pada pembiayaan agribisnis, angsuran pembiayaan bisa menggunakan sistem sebrakan yaitu jangka waktu 4 s.d 6 bulan dengan membayar bagi hasil pada bulan ke 1 s.d bulan ke 3 atau 5, kemudian bulan terakhir membayar bagi hasil dan juga pinjaman pokoknya. Menurut nasabah, dengan adanya sistem sebrakan tersebut dapat meringankan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Karena telah diketahui sebagian besar usaha di sektor agribisnis merupakan usaha musiman yang tidak setiap bulan dapat menuai hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera maupun BPRS Bangun Drajat warga, sampai saat ini tidak ada nasabah agribisnis yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Bapak Sigit Junaedi, S.E selaku GM *Marketing* PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan Bapak Wakhid Hasyim, S.E selaku kepala bagian admnistrasi PT Bangun Drajat Warga.

Melalui adanya prosedur penyaluran pembiayaan agribisnis yang ketat, kedua BPRS tersebut menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agribisnis yang tepat. Salah satunya yaitu melakukan mitigasi terhadap nasabah agribisnis yaitu dengan cara melihat pengalaman nasabah di usaha agribisnisnya, kebanyakan nasabah yang dibiayai yaitu nasabah-nasabah yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selain mitigasi, ada pula upaya memonitoring usaha dan keuangan nasabah dengan melakukan pembinaan keuangan dengan cara silaturrahmi. Melalui silaturrahmi ini, pihak bank dapat mengetahui dan membantu permasalahan yang di hadapi oleh nasabah. Selain itu untuk menambah sistem keamanan BPRS, kedua BPRS tersebut memilih nasabah agribisnis yang tidak hanya memiliki sumber pendapatan dari satu sektor, hal ini bertujuan untuk memback-up pengembalian pembiayaan ketika nasabah mengalami kerugian pada usahanya.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas bahwa dengan menggunakan prosedur penyalurann pembiayaan agribisnis yang ketat, membiayai nasabah yang sudah berpengalaman di bidang agribisnis dan tidak hanya memiliki sumber pendapatan dari satu sektor, sekaligus adanya pembinaan keuangan oleh pihak bank

dapat mengontrol nasabah dalam pengembalian pembiayaan agribisnis. Hal ini dapat ditunjukkan tidak adanya nasabah agribisnis yang bermasalah dalam mengembalikan pembiayaan. Jadi, dapat dikatakan strategi yang digunakan oleh BPRS Madina Mandiri Syariah dan BPRS Bangun Drajat Warga sudah tepat dalam mengontrol nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan teori Richard M. Steers, dkk (1985: 72-73), yang menyebutkan efektivitas sebagai tujuan yang dicapai dengan cara yang tepat.

2. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, sektor agribisnis merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian suatu negara. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10,41% PDRB pada tahun 2016 berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Melalui sektor agribisnis ini, kebutuhan pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

Sebagai bentuk dari penangkapan peluang agribisnis di Kabupaten Bantul, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat warga melakukan beberapa strategi pemasaran. Strategi pemasaran tersebut dilakukan dengan cara promosi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Promosi secara langsung diaantaranya yaitu promosi yang dilakukan oleh AO atau

bagian marketing bank kepada masayarakat, promosi yang dilakukan nasabah *existing* kepada teman bisnisnya, dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok agribisnis. Promosi secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media sosial, salah satunya yaitu facebook, instagram, whatsapp, maupun web site.

Selain peluang dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku agribisnis, pihak bank mendapati hambatan-hambatan dalam pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

- a Sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko
Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh cuaca maupun iklim. Seringkali pelaku usaha mengalami gagal panen ketika kondisi cuaca dan iklim tidak bagus. Hal tersebut dialami oleh beberapa nasabah PT Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang bermata pencaharian sebagai petani padi dan sayuran, petani melon, dan peternak ayam. Resiko dalam sektor agribisnis, khususnya di bidang pertanian sudah sejak dahulu kala. Memang masalah yang dihadapi oleh petani adalah cuaca dan iklim itu sendiri.

Untuk mengantisipasi resiko di sektor agribisnis tersebut, BPRS sebagai pemilik modal mempunyai strategi penyaluran pembiayaan bagi nasabah agribisnis yang dilakukan pada awal analisis pemberian modal. BPRS

membayai nasabah agribisnis yang mempunyai sumber pendapatan lain selain dari hasil usaha dibidang agribisnis.

Dengan adanya sumber pendapatan lain tersebut diharapkan dapat *memback-up* pokok yang harus dibayarkan ketika usaha agribisnis mengalami kerugian.

b Lamanya waktu usaha di bidang agribisnis

Dalam sektor agribisnis, selama ini waktu dianggap menjadi masalah dalam proses produksi karena lamanya menunggu.

Mulai dari proses pembibitan hingga pada waktu memperoleh hasil. Jika dibidang pertanian, umur padi mulai dari benih sampai panen mencapai empat bulan, petani harus menunggu sambil merawat tanamannya hingga sedemikian rupa. Hal ini tidak jauh pula dari bidang peternakan dan perkebunan, semuanya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil. Maka dari itu, jika berbicara mengenai agribisnis maka hal tersebut tidak lepas dari alam, dan butuh waktu sesuai dengan ciptaan Illahi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moehar Daniel, 2002: 34-48 tentang waktu usaha pertanian.

c Sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar

Dalam sektor agribisnis ini memerlukan input diantaranya yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida maupun obat-obat lainnya, dan tenaga kerja. Keseluruhan input tersebut memerlukan biaya yang besar dan harga setiap unitnya semakin mahal.

Seperti yang dikemukakan oleh Moehar Daniel, 2002: 34-48 bahwa salah satu masalah pertanian adalah biaya usaha. Biaya seringkali menjadi masalah bagi para pelaku agribisnis khususnya petani dalam pengadaan input atau sarana produksi.

- d Orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit

Semakin berkembangnya zaman, sektor agribisnis khususnya pertanian mulai tidak diminati, terlebih persentase tenaga kerja tua lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja usia muda. Sedikitnya orang yang berkecimpung di sektor agribisnis ini juga di dasari oleh semakin sempitnya lahan usaha Di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah diketahui bahwa sekarang banyak pembangunan-pembangunan tempat pariwisata seperti hotel, mall, tempat wisata, dll.

3. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis terhadap Hasil Usaha Nasabah BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Distribusi pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri sejahtera dapat dikatakan kurang efektif. Tabel distribusi pembiayaan agribisnis dapat dilihat pada Tabel 6 bagian hasil penelitian. Pembiayaan sebesar Rp66.938.435.692 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan

kepada masyarakat, hanya 0,15% yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis. Tepatnya yaitu hanya sebesar Rp101.000.000 yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis. Tidak jauh berbeda dengan PT BPRS Bangun Drajat Warga, dari pemberian sebesar Rp27.102.435.216 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, hanya sebesar 2,59% atau dengan total uang sebesar Rp802.500.000 yang disalurkan kepada pelaku agribisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, faktor yang menyebabkan sedikitnya pemberian yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis dikarenakan tidak adanya arahan khusus untuk membiayai sektor agribisnis. Pihak BPRS belum memberikan arahan khusus untuk sektor agribisnis karena memang terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi ketika memberikan pemberian pada sektor ini, diantaranya yaitu sektor agribisnis merupakan sektor yang berisiko.

Berbeda halnya dengan distribusi pemberian dari kedua BPRS yang masih belum maksimal, dampak pemberian agribisnis terhadap hasil usaha nasabah dapat dikatakan efektif. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa semua nasabah agribisnis pada tahun 2017 mengalami peningkatan omset setelah menggunakan pemberian, baik itu nasabah BPRS Bangun Drajat Warga maupun nasabah BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa omset nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera setelah pembiayaan nasabah agribisnis mengalami peningkatan. Omset awal yang paling rendah sebesar Rp2.000.000 meningkat menjadi Rp.4.000.0000, sedangkan nasabah dengan omset sebelum pembiayaan sebesar Rp200.000.000 meningkat menjadi Rp250.000.000. Presentase peningkatan omset tertinggi sebesar 64% dari sektor pertanian dan terendah pada sektor perkebunan dengan presentase peningkatan sebesar 12%. Tidak jauh berbeda pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa omset nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga setelah menggunakan pembiayaan mengalami peningkatan. Presentase peningkatan tersebut sebesar 17% hingga 85% dari omset awal sebelum pembiayaan.

Pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dinilai dapat mencapai tujuan pembiayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001), pembiayaan memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut.

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

Dalam pelaksanaan bagi hasil, penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi melalui bagi hasil ini, nasabah tidak terbenani untuk membayar bunga yang tinggi, namun bagi

hasil yang tetapkan sesuai dengan kemampuan oleh nasabah itu sendiri. Sejauh ini, semua nasabah pembiayaan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak ada yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan, terutama dalam pembayaran bagi hasil. Dari hasil wawancara semua nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga mengatakan bahwa dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini mereka tidak merasa diberatkan. Terlebih terdapat angsuran sistem sebrakan yang dapat digunakan oleh nasabah agribisnis sehingga memudahkan nasabah dalam mengangsur pembiayaan.

- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
Prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh PT BPRS Bangun Drajat warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera menunjukkan kemudahan pengajuan pembiayaan agribisnis oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, semua nasabah mengatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan yang disertai persyaratan administrasi mudah untuk dipenuhi oleh calon nasabah. Hal ini didukung dengan adanya panduan dari AO terkait pengumpulan berkas administrasi.
- 3) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran

Melalui pembiayaan agribisnis ini, nasabah dapat mengembangkan usahanya. Terlebih nasabah yang dahulunya mempunyai masalah keuangan untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan pembiayaan agribisnis di kedua PT BPRS di Bantul, mereka dapat memenuhi kebutuhan biaya input. Berdasarkan hasil penelitian, omset semua nasabah setelah menggunakan pembiayaan agribisnis mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan yang diberikan terhadap output yang dihasilkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, khususnya PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdiri dari 3 tahap yaitu 1) tahap pengajuan pembiayaan yang terdiri dari pengisian form pembiayaan oleh nasabah, BI *Checking*, dan survey lapangan, 2) tahap pencairan dana yang dilaksanakan bersamaan dengan akad, 3) tahap pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan agribisnis yang ditetapkan oleh BPRS sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung adanya pernyataan mudahnya pengajuan pembiayaan oleh semua nasabah yang diwawancara, kecepatan dalam tahap pencairan dana, dan ketepatan dalam pengembalian pembiayaan. Selain itu, dari pihak bank juga sudah menerapkan sistem analisis kelayakan pembiayaan yang baik, diantaranya yaitu analisis nasabah melalui BI *Checking*, dan survey lapangan.
2. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tugas menyalurkan dana kepada masyarakat, PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan kepada sektor agribisnis. Penyaluran pembiayaan tersebut didasari atas peluang pentingnya sektor agribisnis yang dapat memenuhi kebutuhan pangan

suatu daerah, khususnya kebutuhan pangan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan pembiayaan agribisnis tersebut, kedua BPRS mendapati hambatan-hambatan yaitu 1) sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko, 2) lamanya waktu usaha di bidang agribisnis, 3) sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar, 4) orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit.

3. Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Hal tersebut berbeda halnya dengan distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut yang dinilai kurang efektif karena hanya terdapat 5 nasabah agribisnis atau sebesar 0,15% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan, dan hanya terdapat 14 nasabah agribisnis atau sebesar 2,59% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang disalurkan kepada pelaku agribisnis. Presentase tersebut didasari karena tidak adanya target pasar khusus pelaku agribisnis dari kedua BPRS tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa implikasi yang dapat disampaikan:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian yang diterapkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah efektif. Hal ini mengandung implikasi bahwa suatu kegiatan ataupun kebijakan harus memiliki SOP untuk menjalankan kegiatan tersebut, begitu pula pemberian harus memiliki prosedur dalam menjalankannya, khususnya pada penelitian ini yaitu prosedur pemberian agribisnis yang harus dimiliki oleh BPRS.
2. Dalam pengimplementasian suatu kegiatan atau kebijakan tidak terlepas dari peluang dan hambatan, begitu pula yang dihadapi BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menyalurkan pemberian agribisnis di Kabupaten Bantul. Hal ini mengimplikasikan bahwa BPRS harus memiliki strategi yang tepat dalam meminimalisir atau mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian agribisnis BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera efektif dalam meningkatkan omset nasabah agribisnis. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa pemberian agribisnis BPRS merupakan pemberian modal kerja maupun modal usaha bagi pelaku agribisnis yang bertujuan untuk membantu kebutuhan modal dalam mengembangkan usaha di sektor agribisnis. Namun, jika dilihat dari jumlah pemberian agribisnis yang

dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis, jumlah nasabah yang menggunakan pemberian agribisnis masih sedikit.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan metode wawancara yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
2. Hanya satu diantara tiga BPRS yang ada di Kabupaten Bantul yang mengijinkan mengambil data langsung kepada nasabah yaitu PT BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan, antara lain:

1. Prosedur pemberian yang digunakan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera kedepannya perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar nasabah lebih mudah dalam mengajukan pemberian dan tepat dalam pengembalian pemberian. Terdapat pula beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak BPRS pada tahap-tahap prosedur pemberian terutama pada tahap pengembalian dana yaitu diperlukan upaya *controlling* nasabah dalam pengembalian pemberian, perlu adanya pembinaan keuangan dan pembinaan usaha secara manajerial secara rutin oleh pihak BPRS kepada nasabah agribisnis. Pembinaan tersebut dapat

dilakukan selama dua minggu sekali ataupun sebulan sekali. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan pengangsuran akibat adanya masalah usaha yang tidak dapat diselesaikan.

2. Pihak BPRS perlu meningkatkan strategi pembiayaan agribisnis yang dapat meminimalisir ataupun mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BPRS kedepannya harus meningkatkan strategi penyaluran pembiayaan agribisnis dan mempertahankan konsistensi peningkatan omset nasabah di Kabupaten Bantul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah maupun hasil pertanian nasabah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pembuatan target khusus pembiayaan di beberapa sektor, khususnya sektor agribisnis. Target ini bertujuan untuk mempermudah pihak BPRS untuk mencapai kuantitas maupun kualitas pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, upaya dalam mempertahankan konsistensi peningkatan omset nasabah agribisnis diperlukan adanya laporan analisis usaha nasabah agribisnis secara periodik, bisa 3, 6, atau 12 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan finansial nasabah, sebagai alat analisis keefektivan pembiayaan, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi pembiayaan maupun pemasaran di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Azzahrah, Mufida Amalia. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM (Studi kasus : Pada BMT X Jakarta)*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bishop, C.E. dan W.D. Toussaint. 1979. *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Mutiara.
- Bps.go.id
- Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, et al. (2004). *Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia*. Jurnal Bank Indonesia.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2009. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Prenhallindo Jakarta.
- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharim, Adiwarman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mansoer, Hamdan. 1989. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES.
- Sarifuddin, Mohamad. 2017. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani, Kota Metro)*. [Tesis]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamppung.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Sochih, Mohammad. (2008). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity) untuk*

Mengukur Keberhasilan Manajemen pada PT BPRS Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT BPRS Margirizki Bahagia). Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 6, 82-95.

Solihin, Ismail. *_. Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Steers, Richard M., Gerardo R. Ungson, Richard T. Mowday. 1985. *Managing Effective Organizations*. California: Kent Publishing Company.

Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : EKONISIA.

Syafar, Muhammad. 2006. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah terhadap Petani Agribisnis Sayuran Pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor (Studi Kasus Petani Sayuran Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Ubaedillah, Ibnu. 2011. *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)*. [Skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

LAMPIRAN



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
BANGUN DRAJAT WARGA**



Kantor Pusat : Jl. Gedungkuning Setatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552 Fax (0274) 452424 Email: bprs_bdw@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jendral Sudirman No.79, Bantul Telp. (0274) 6469543 (Kompleks Balai Musim)
Kantor Kas Ngawi : Jl. Margorejo, Batuvelro, Bangundapatan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6496425

SURAT KETERANGAN
NO: 167/BDW/Ops/VI/2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Nur Utami
TTL : Paiti, 29-02-1996
No. Mhs : 14804244002
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan Skripsi dengan judul :
"Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS Terhadap Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta"

Yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 30 Maret 2018

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2018
PT BPR SYARI'AH BDW

Djuna Siswati, SI
Direktur Utama

Hilaf Farfa Demi Merah Marah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 372/E.DIR/BPRS-MMS/V/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa:

Nama : WAHYU NUR UTAMI
No. Mhs : 14804244002
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Prodi : Pendidikan Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
guna penyusunan skripsi dengan judul “**“EFektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS Terhadap
Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapan *Jazakumullah khairan katsiran*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bantul, 31 Mei 2018

BANK MADINA SYARIAH

SABDO NUGROHO, SP
Direktur

Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon, Bantul.
Yogyakarta, 55187
Telp. : 0274 - 372788 — Fax. : 0274 - 413636
Email : bank.madina.syariah@gmail.com
www.bankmadinasvariah.com

Sahabat dalam Bermu'amalah



PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Terpercaya dan diawasi oleh

PEDOMAN WAWANCARA

PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

A. Identitas

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil singkat PT BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?
3. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan Bank Syariah lain di Kabupaten Bantul?
4. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada masyarakat Kabupaten Bantul?
5. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

6. Apa saja pемbiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
7. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pемbiayaan yang diminta?
8. Bagaimana prosedur pelaksanaan pемbiayaan-pемbiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
9. Bagaimana proses pencairan dana pемbiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
10. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Bangun Drajat Warga terkait pемbiayaan yang diminta oleh nasabah agribisnis?
11. Bagaimana sistem bagi hasil pемbiayaan syariah di PT BPRS Bangun Drajat Warga?
12. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pемbiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
13. Bagaimana cara PT BPRS Bangun Drajat Warga dalam mempromosikan pемbiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?
14. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pемbiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
15. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pемbiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga di Kabupaten Bantul?
16. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pемbiayaan dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga?

17. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?
18. Bagaimana pengembalian pembiayaan agribisnis oleh nasabah kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?
19. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
20. Apakah pembiayaan yang diberikan PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

PEDOMAN WAWANCARA

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

A. Identitas

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil singkat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Apa yang membedakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?
3. Apa yang membedakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan Bank Syariah lain di Kabupaten Bantul?
4. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Bantul?
5. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

6. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
7. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pembiayaan yang diminta?
8. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
9. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
10. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terkait pembiayaan yang diminta oleh nasabah agribisnis?
11. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan syariah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
12. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
13. Bagaimana cara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?
14. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
15. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera di Kabupaten Bantul?

16. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pemberian dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
17. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
18. Bagaimana pengembalian pemberian syariah oleh nasabah agribisnis kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
19. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
20. Apakah pemberian yang diberikan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

PEDOMAN WAWANCARA
NASABAH AGRIBISNIS PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

A. Identitas

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Pekerjaan Utama :

B. Daftar Pertanyaan

- 1) Berapa lama bekerja di bidang pertanian?
- 2) Usaha pertanian apa yang sedang dikembangkan?
- 3) Apa masalah dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
- 4) Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
- 5) Pernahkah menggunakan pembiayaan dari bank lain selain PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 6) Apakah saat ini menggunakan pembiayaan lain selain dari PT BPRS Bangun Drajat Warga?

- 7) Kenapa memilih menggunakan produk perbankan syariah?
- 8) Kenapa memilih untuk menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 9) Bagaimana bentuk penawaran pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 10) Jenis pembiayaan syariah apa yang digunakan?
- 11) Kenapa memilih menggunakan jenis pembiayaan syariah tersebut?
- 12) Berapa besar pinjaman yang diajukan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 13) Berapa lama angsuran pembiayaan yang diambil?
- 14) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 15) Bagaimana tahap pengajuan pembiayaan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 16) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 17) Bagaimana pendampingan usaha oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabah?
- 18) Bagaimana bagi hasil yang digunakan PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap pembiayaan yang diambil?
- 19) Bagaimana pelayanan pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 20) Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut?

- 21) Apa saja tanaman yang ditanam?
- 22) Berapa pendapatan pertanian sebelum pembiayaan?
- 23) Berapa pendapatan pertanian setelah pembiayaan?
- 24) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat
Warga terhadap hasil pertanian nasabah?
- 25) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat
Warga terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

HASIL WAWANCARA

PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara	: 12 Maret 2018
Waktu Wawancara	: 08.19 s.d. 09.00
Lokasi Wawancara	: Kantor Pusat PT BPRS Bangun Drajat Warga

A. Identitas

Nama	: Wakhid Hasyim, S.E.
Usia	: 37
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	: Piyungan, Bantul, DIY
Jabatan	: Kepala Bagian Pembiayaan

B. Daftar Pertanyaan

21. Bagaimana profil singkat PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Berdiri tahun 1994, dulu kantornya terletak di Ngipik. Sekarang sudah berumur 24 Tahun, asset diatas 100 M, untuk nasabah outstandingnya sudah 60 M. Nasabah terdiri dari sektor perdangan dan konsumtif, banyak di bagian murabahahnya. Sektor perdagangan dengan akad murabahah diatas 50%. Ada juga yang dari sektor agribisnis, namun presentasenya sangat kecil. sedangkan sektor konsumtif lebih digunakan untuk membeli rumah, membeli mobil, dll.

22. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?

Secara umum tidak ada perbedaan karena memang sistem di BPRS sudah ada aturannya, hanya saja di BDW merupakan BPRS kedua tertua di Yogyakarta.

23. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan Bank Syariah lain di Kabupaten Bantul?

Kalau di BPRS lebih ke pelaku mikro ekonomi, dan yang berbeda dr BDW yaitu adanya pembiayaan bagi sekolah-sekolah melalui potongan gaji perbulan.

24. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada masyarakat Kabupaten Bantul?

- a) Pembiayaan jual beli
- b) Pembiayaan multijasa
- c) Pembiayaan sewa beli
- d) Pembiayaan modal kerja

Di sektor pedagangan menggunakan akad mudharabah yang meliputi warung kelontong, properti, hanya saja untuk yang sektor pertanian memang sangat kecil. Kebanyakan mereka menggunakan siste sebrakan yaitu 4 bulan sekali.

Adanya dana talangan umrah.

25. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Membantu dalam pengadaan modal untuk para petani. Dalam awal pemberian terdapat asumsi awal terhadap hasil pertanian yang akan diperoleh.

26. Apa saja pemberian yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Pemberian yang ditawarkan sama dengan nasabah lainnya

27. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pemberian yang diminta?

Persyaratan juga sama dengan nasabah lainnya, yang membedakan yaitu di agribisnis tidak menggunakan slip gaji.

28. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian-pemberian agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Prosedur sama, perbedaannya adanya pembinaan seperti silaturrahmi ke nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah. Tidak ada pembinaan secara teknis pertanian karena memang tidak ada sumberdaya yang memadai.

29. Bagaimana proses pencairan dana pemberian agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Besar dana yang diberikan kepada petani yaitu melalui analisis sesuai kebutuhan dan kemampuan pengembalian dari nasabah itu sendiri.

30. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Bangun Drajat Warga terkait pemberian yang diminta oleh nasabah agribisnis?

Adanya pembinaan seperti silaturrahmi ke nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah. Tidak ada pembinaan secara teknis pertanian karena memang tidak ada sumberdaya yang memadai.

31. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan syariah di PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Bagi hasilnya di akhir. Pada awal pembiayaan terdapat estimasi bagi hasil.

32. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Karena agribisnis dinilai sangat beresiko maka dari pihak bank tidak mengambil pasar di sektor tersebut. Dari BPRS sendiri kalah saing dengan adanya KUR yang langsung menjangkau pelaku agribisnis.

33. Bagaimana cara PT BPRS Bangun Drajat Warga dalam mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?

Promosi lewat medsos dan AO terjun langsung ke lapangan untuk mencari nasabah.

34. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Karena memang agribisnis sangat beresiko maka dari pihak bank tidak memiliki target pasar khusus untuk ke situ.

35. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga di Kabupaten Bantul?

Nasabah agribisnis sangat sedikit, kalau di pusat hanya 1 nasabah.

36. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Nasabah agribisnis sangat sedikit sekali, dibawah 10 nasabah.

37. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak bisa dirata-rata mungkin bisa di range antara 5 juta s.d 100jt.

38. Bagaimana pengembalian pembiayaan agribisnis oleh nasabah kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pengembaliannya selama ini lancar-lancar saja, jika terjadi kerugian maka dari pihak nasabah hanya perlu mengembalikan pokok saja.

39. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Tidak bisa di rata-rata, setiap nasabah berbeda-beda. Tergantung plafon pembiayaannya.

40. Apakah pembiayaan yang diberikan PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

Sudah efektif karena nasabah mendapatkan modal yang diperlukan. Hasil panennya meningkat, yang dahulunya hanya 1 kotak sawah dengan adanya pembiayaan mereka bisa menambah lahan sawah yang dikerjakan. Tidak ada yang menunjukkan hasil pertaniannya meningkat, hanya sekedar asumsi dari pihak bank.

HASIL WAWANCARA

PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2018
Waktu Wawancara : 09.30 s.d. 10.15
Lokasi Wawancara : Kantor Cabang Bantul PT BPRS Bangun Drajat Warga

A. Identitas

Nama : Nur Hidayat
Usia : 49
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jl. Sawit UH 128 A, Semanggi, Umbulharjo, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Cabang

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil singkat PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Berdiri Tahun tanggal 2 Februari 1994. Pemegang saham sebagian besar dari Muhammadiyyah, dan dianggaran dasar sebanyak 50 orang pemegang saham. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2015 mendirikan kantor cabang di Bantul. Asset sekitar 10 M dengan outstanding 6,4 M, dengan laba 390jt selama satu tahun. BEP selama 1 tahun sendiri sudah tercapai

2. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?

Dari sisi pemegang saham yang paling besar. PT BPRS lainnya pemegang sahamnya biasanya dari perorangan, berbeda dengan BDW yang sebagian besar pemegang sahamnya adalah milik lembaga yaitu perserikatan muhammadiyyah. Karena kita milik muhammadiyyah jadi banyak bekerja sama dg muhammadiyyah baik itu pendanaan, dll. Secara prinsip secara perkangan syariah tidak ada perbedaan karena masuk perundnag2an yang sama.

3. Apa yang membedakan PT BPRS Bangun Drajat Warga dengan Bank Syariah lain di Kabupaten Bantul?

Dengan bank umum tentu regulasinya berbeda. Jika dari segi pendanaan bank syariah lainnya besar jadi ranahnya lebih luas. Namun BPRS lebih mengarah pada ranah mikro dengan modal yang belum terlalu besar.

4. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada masyarakat Kabupaten Bantul?

Hampir sama dengan lainnya, hanya memang perbedaannya BDW belum melakukan Rahn atau pegadaian.

5. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Untuk arahan secara langsung kepada para petaninya belum ada meskipun di kabupaten bantul masih banyak lahan pertanian. Hanya kami membiayai kepada mereka memang tidak ada, tp ada beberapa nasabah yang kami biayai contohnya petani melon, selain petani dia juga pedagang,

petani yang memiliki usaha lain. Namun jika membiayai petani murini tidak ada.

Apakah ada target pasar khusus?

Kita lebih mengarah pada target pasar konsumtif. Dari sisi akada lebih mudah, kemudian dari segi keamanan, kemudian sumber pengembaliannya yaitu yg memiliki keampuan pengembalian yang rutin. Untuk yang sifatnya usaha biasanya arahnya perdagangan, baru sektor lainnya. Untuk industri jasa lumayan besar, jumlah orangnya tidak begitu besar, namun secara kualitasnya besar.

6. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Pembiayaan yang ditawarkan sama saja dg sektor lainnya, yaitu modal usaha dan modal kerja. Akadanya ada yang mudharabah dan syirkah. Kebanyakan untuk sektor agribisnis lebih banyak menggunakan akad mudharabah. Uniknya di agribisnis, kita biayai dari panen ke panen, dengan sistem sebrakan yaitu hanya 4 bulan.

7. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pembiayaan yang diminta?

Untuk persyaratan administratif sama saja.

8. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Yang pertama yaitu mengisi aplikasi pendaftaran di BDW

9. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Ada SOP terkait prosedur pencairan dana.

10. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Bangun Drajat Warga terkait pembiayaan yang diminta oleh nasabah agribisnis?

Jadi pembinaan terhadap nasabah ada. Pembinaan disini lebih kepada pembinaan keuangan, jadi lebih ke silaturrahmi. Hal ini untuk mengetahui masalah yang dialami nasabah kemudian kita membantu untuk mencari solusi. Untuk pembinaan secara manajerial atau pengelolaan usaha memang tidak ada.

11. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan syariah di PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Ketika kita menerapkan konsep2 syirkah, kita menggunakan nisbah. Rata-rata selama ini dalam menentukan nisbah, kesulitannya yaitu nasabah tidak memiliki laporan keuangan. Kenbayan nasabah belum terlalu terbuka untuk menyampaikan masalah laporan keuangan. Untuk menentukan nisbah melalui perkira2an. Solusinya yaitu menggunakan pendekatan prakiraan2 saat wawancara. Berapa modal yang diambil, dan perkiraan hasil dari adanya modal tersebut kemudian kita proyeksikan. Jika ada permasalahan, bank hanya bisa mengendalikan modal pokok saja.

Seleksi pemberian modal usaha harus menggunakan standar analisa pembiayaan. Tetapi kita akan menggunakan jaminan, dalam kerja sama syirkah seharusnya tidak perlu menggunakan jaminan, namun di BDW

menggunakan itu untuk jaga-jaga. Analisa karakter dari calon debitur sangat diperlukan. Kemudian kemampuan pengembalian dari nasabah, dari keuangan meliputi kekuatan modal nasabah. Tidak kalah pentingnya dalam sektor agribisnis adalah perkiraan cuaca. Apalagi sekarang cuaca sangat sulit untuk diprediksi, sehingga mengganggu sektor industri

12. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Agribisnis adalah sektor yang sampai kapanpun akan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sampai saat ini, dari pihak BDW jika langsung masuk dalam sektor agribisnis banyak yang dikhawatirkan yaitu modal besar, orang yang bercimpung di sana semakin lama semakin sedikit, meskipun ada pasti memerlukan biaya yang tinggi. Jika dilihat dari peluangnya yaitu besar, namun di Jogja lahanannya tidak seluas di luar jawa, kesusahan dalam mencari tenaga kerja, pupuk makin lama makin naik. Jadi asumsinya modal besar namun yang dihasilkan tidak seberapa.

Apakah ada rencana untuk memperluas pasar agribisnis?

Jikapun kita memperluas, maka kita harus meningkatkan keamanan. Untuk memback up keamanan tersebut yaitu perlu nasabah yang memiliki sumber pengembalian lain selain sumber agribisnis. Dulu, kita tidak pernah berani membiayai sektor peternakan, karena sangat beresiko.

13. Bagaimana cara PT BPRS Bangun Drajat Warga dalam mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?

Promosi dilakukan pada kelompok-kelompok anggota muhammadiyah.

14. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
15. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga di Kabupaten Bantul?
- Kisarannya tidak banyak, hanya sekitar 5 orang.
16. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Perbandingannya sangat kecil sekali. 300 : 5. Dari fortolio 6,4 M : 100jt
17. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Antara 20 s.d 30 juta per 6 bulan.
18. Bagaimana pengembalian pembiayaan agribisnis oleh nasabah kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Kami mengambil nasabah-nasabah yang tidak hanya memiliki satu sumber pengembalian, sampai saat ini lancar.
19. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?
- Kisaran pendapatan setara dengan 1,7% per bulan. Ingat di sistem syariah harus menggunakan nama setara, tidak boleh presentase. Jika menggunakan presentase nanti terjebak riba.
20. Apakah pembiayaan yang diberikan PT BPRS Bangun Drajat Warga kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

Jika dilihat dari sudut pandang bank efektif:

Ternyata sampai saat ini nasabah dr sektor agribisnis tersebut lancar. Jadi ada pendapatan yang diberikan kepada bank.

Apakah bisa meningkatkan hasil pertanian nasabah?

Selama ini yang terpenting adalah kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi

HASIL WAWANCARA

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2018
Waktu Wawancara : 09.5 s.d. 09.50
Lokasi Wawancara : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

A. Identitas

Nama : Novie, S.H.
Usia : 33
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Banguntapan, Bantul
Jabatan : Legal Officer

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil singkat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Kalau profil singkatnya lebih di website saja. Kalau cabang belum ada, kalau kantor kas ada dua yaitu di pasar beringharjo dan mangiran, srandakan.

2. Apa yang membedakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?

Kalau segi produk ada beberapa macam yang identik dengan bank madina yaitu tabungan arisan madina. Kalau untuk pembiayaan lain hampir sama tapi bank madina lebih mengushaakan yang terbaik mungkin.

Adakah sasaran umum market?

Tidak ada, kita menarget untuk semua masyarakat umum.

3. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Bantul?

Untuk yang sekarang berjalan yaitu skimnya murabahah, mudharabah, qard, musyarakah, dan ijarah.

4. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Terus terang untuk agribisnis yang di maksudkan mbak ayu, di bantul kita belum ada, jadi pembiayaan kita nasabahnya di luar Kabupaten bantul, untuk perikanan di kulon progo, untuk pertanian kebanyakan di kulon progo dan pertaniannya lebih ke buah-buahan dan sayuran.

Yang existing sampai 2018 ini hanya 15 nasabah dari sektor agribisnis. Memang hanya sedikit untuk sektor tersebut. Jadi ada yang modal kerja dan ada juga yang investasi. Contohnya ada petani buah modal kerja ke kita dg skim mudharabah atau musyarakah.

5. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Di web sudah ada

6. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pembiayaan yang diminta?

Di website sudah ada. Kalau untuk perorangan yang usahanya masih kecil tidak ada legalitas seperti npwp dll, jadi kami minta surat keterangan usaha

dari daerah setempat. untuk sektor yang sudah besar mereka sudah memiliki npwp sendiri. Untuk persyaratan yang lain sama saja.

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Kalau dari flow chat mmulai dari awal.

1. nasabah datang ke madina bisa langsung ketemu CS kita
2. marketing mencari nasabah, oleh CS nanti di regristasi, kemudian melengkapi dokumen yang diperlukan, setelah itu dikembalikan ke AO lagi. Atau kalau nasabahnya datang ke kantor, nanti nasabah diserahkan ke marketing yang berkompeten sesuai wilayahnya. Sebelum marketing survey ke lapangan, marketing cek BI Cecking yaitu untuk mengetahui pembiayaan orang itu di bank lain, karena sekarang sudah beralih ke OJK maka dinamakan informasi debitur. Setelah datanya sudah keluar, nanti diberikan marketing kemudian marketing survey ke lapangan. Ada 5C + 1S aspek yang akan di crosscek yaitu meliputi aspek character, capacity, collateral, condition of economic, capital, syariah. Untuk karakter kada ada orang yang ditanya adakah pinjaman di bank lain, bisanya mereka cenderung tidak jujur, collateral jaminannya dia mencover apa tidak dengan plafond yang diajukan, kemudian untuk capacity kemampuan dia membayarnya bagaimana bisa dilihat dari laporan keuangan, kemudian untuk kondisi ekonomi bisa dilihat dari kondisi usahanya. Jika survey tidak memadai maka pihak marketing membuat surat penolakan. Jika oke, marketing membuat analisis yang dinamakan memorandum analisis

pembiayaan yang mencantumkan analisis 5C + S, plafond berapa, margin atau bagi hasil sekian, dan biaya-biaya, kemudian diajukan ke GM marketing atau director marketing. Setelah itu AO sudah dikomitekan dengan GM Marketing kemudian dimasukkan ke Legal Officer untuk pengecekan keabsahan data-datannya. Setelah itu akad, kemudian pencairan.

Berapa lama pencairan dana?

Jika datanya sudah lengkap bisa 3 hari kerja, atau jika nasabah lama bisa di bawah 5 hari, untuk nasabah baru sekitar 5 hari. Untuk dari Madina sendiri targetnya 5 hari cair.

8. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Include di atas

9. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terkait pembiayaan yang diminta oleh nasabah agribisnis?

Tidak ada pembinaan, namun lebih ke sosialisasi dr marketing ke kelompok tani seperti penawaran produk. Untuk penyuluhan tidak ada, memang bukan sesuai dengan bidang kami.

10. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan syariah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Sistem bagi hasilnya untuk secara perhitungannya lebih ke marketing. Marketing membuat laporan neraca laba rugi, lebih ke revenuesharing.

Ada yang dinamakan profit sharing dan revenue sharing. Ada ekspektasi proyeksi bagi hasil.

Ada gak bu yang sampai rugi?

Untuk selama ini lancar, karena memang jangka waktunya tidak lama, biasanya bulan 1 s.d 5 bagi hasil, kemudian bulan ke 6 bagi hasil dan pokoknya. Hal ini biasanya disebut dengan sistem sebrakan.

11. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Peluangnya sih lumayan bagus. Untuk peluang dari segi market nasabah existing, mereka merekomendasikan calon-calon debitur kepada bank madina.

12. Bagaimana cara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?

Promosinya yaitu dengan cara sosialisasi ke kelompok-kelompok tani, person to person. Setelah pembiayaan itu hasilnya lebih baik.

13. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Hambatannya lebih ke bencana alam, karena pertanian memang sangat dipengaruhi sekali dengan alam. Biasanya memang kita ambil nasabah yang tidak hanya budidaya di bidang pertanian saja namun ada usaha lainnya yang dapat mencover pengembaliannya.

14. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pemberian PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera di Kabupaten Bantul?

Hanya 15 nasabah dari agribisnis

15. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pemberian dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

300an : 15an

16. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Kita tidak bisa merata-rata karena nasabah berbeda-beda kebutuhan. Untuk nasabah yang masih kecil, pinjamannya juga masih kecil, untuk nasabah yang masih baru juga masih kecil karena masih belum tau kemampuan pengembaliannya. Kebanyakan 50 jt ke atas.

17. Bagaimana pengembalian pemberian syariah oleh nasabah agribisnis kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Alhamdulillah tidak ada yang menunggak.

18. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Mungkin yang lebih tau pihak marketingnya. karena plafondnya berbeda maka tidak bisa dirata-rata.

19. Apakah pemberian yang diberikan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

Alhamdulillah sudah. Jadi data yang keluar harus didiskusikan dulu dengan pihak internal apakah datanya boleh keluar atau tidak.

HASIL WAWANCARA

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Tanggal Wawancara : 27 Maret 2018
Waktu Wawancara : 08.44 s.d. 09.20
Lokasi Wawancara : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

A. Identitas

Nama : Sigit Junaedi, S.E
Usia : 40
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Komplek Dalem Kalegan, Kaliurag Blok B2
Jabatan : GM Marketing

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil singkat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

BPRS Madina berdiri sejak tahun 2008 tanggal 16 Januari berarti sudah 10 tahun. Saat ini memamng kita kantor pusatnya masih di Jl Parangtritis, insyaAllah tahun ini pindah ke kantor yang baru. Saat ini madina punya 1 kantor pusat dan 2 kantor kas. Saat ini secara aset madina di posisi ke tiga.

2. Apa yang membedakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan PT BPRS lainnya di Kabupaten Bantul?

Sebetulnya kalau secara produk atau garis besar sama, khususnya prosuk lending. Yang berbeda yaitu ada beberapa produk unggulan yaitu tabungan arisan madina dan tabungan umroh. Sebetulnya di BPRS lain punya

tabungan umroh. Cuma perbedaannya di sini secara bagi hasil bagi hasil satu tahun, jadi lebih mempercepat dan mempermudah nasabah untuk umroh. Untuk lendingnya memang madina syariah termasuk yang terbesar, jadi relatif lebih merata di berbagai jenis sektor ekonomi. Salah satunya yaitu kita membiayai kontraktor, sektor agribisnis, sektor jasa, sektor perdaganagan.

3. Apa yang membedakan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan Bank Syariah lain di Kabupaten Bantul?

Kalau bank syariah bisa lebih fleksibel dalam hal menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, salah satunya yaitu pola angsuran menyesuaikan dengan pola usaha dan kebutuhan nasabah. Kalau di bank umum, mereka terkadang terpaku pada satu jenis pola angsuran, efektif hantas, jadi setiap bulan harus ada porsi pokok dan marginya, padahal tidak semua nasabah bisa diperlakukan dengan sama.

4. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Bantul?

Jenis akadnya yaitu murabahah jual beli, musyarakah, mudharabah, ijarah multi jasa. Empat itu yang biasanya kita pakai.

Kalau untuk agribisnis banyaknya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Kalau untuk investasi, itu lebih prefer jual beli murabahah.

5. Apa tujuan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Lebih pada penyerapan kebutuhan para calon nasabah madina. Kerana memang amanah dari take holder bank madina syariah ingin lebih banyak bermanfaat kepada masyarakat luas. Salah satunya kita membiayai sektor-sektor usaha yang tidak banyak diminati oleh bank lainnya, contohnya sektor kontraktor, agribisnis, dan juga mempermudah masyarakat untuk umroh dengan menyediakan tabungan umroh.

6. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Jenis akadnya yaitu murabahah jual beli, musyarakah, mudharabah, ijarah multi jasa. Empat itu yang biasanya kita pakai.

Kalau untuk agribisnis banyaknya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Kalau untuk investasi, itu lebih prefer jual beli murabahah.

7. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah agribisnis untuk mendapatkan pembiayaan yang diminta?

Sebetulnya syarat secara umumnya sama.

Pertama terkait legalitas diri, yaitu maksudnya jika dia individu (KTP, surat nikah, npwp pribadi),

Kedua, legalitas usaha, jika dia skala masih kecil kita minta surat keterangan usaha dari daerah setempat,

Ketiga, data keuangan mencakup tabungan atau laporan keuangan namun jika mereka tidak punya laporan keuangan nanti kita bantu untuk membuat laporan keuangan.

Keempat, data terkait jaminan, jaminan dalam bentuk aset tanah maupun rumah, kendaraan, cash collateral dalam bentuk tabungan atau deposito di bank madina.

8. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?
 1. nasabah datang ke bank, kemudian mengisi aplikasi pembiayaan,
 2. setelah itu diproses oleh marketing bank madina, proses itu mencakup BI Cekking.
 3. survey ke nasabah (rumah, jaminan, dan lokasi usaha)
 4. marketing mengajukan persetujuan kepada komite pembiayaan.
 5. pencairan dana

9. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan agribisnis oleh BPR Syariah di Kabupaten Bantul?

Tergantung dari nasabah dalam melengkapi dokumen. Kalau dari kami sendiri, ada beberapa nasabah yang 2 hari sudah cair, ada 1 hari sudah bisa cair.

10. Apakah ada pembinaan usaha agribisnis dari pihak PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terkait pembiayaan yang diminta oleh nasabah agribisnis?

Sampai saat ini sih tidak ada pembinaan secara teknis pengelolaan usaha agribisnis, kita hanya sekedar silaturrahmi untuk tau bagaimana kondisi usaha, ada masalah atau tidak. Kita tidak menilai dari segi agribisnisnya tapi kita lebih lihat bagaimana atau kemampuan bayar nasabah itu sendiri.

11. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan syariah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Bagi hasilnya mengikuti nisbah yang diikuti di awal, tetapi dalam penentuan nisbah ada proses perhitungan dari bank atau yang disebut proyeksi.

12. Bagaimana peluang dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Memang sampai saat ini madina ssudah membiayai beberapa pelaku agribisnis. Kita bekerja sama dengan BMT-BMT. Ada yang pelaku agribisnis yang kita dapat dari referensi BMT. Selain itu ada referensi dari nasabah existing. Dari mereka kita mendapat referensi beberapa calon nasabah.

13. Bagaimana cara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mempromosikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku agribisnis?

Promosi salah satunya dari nasabah existing, dan dari pihak marketing itu sendiri. Kalau media promosi yaitu website, semua media sosial, brosur, dan juga video profil.

14. Bagaimana hambatan dalam menyalurkan pembiayaan syariah terhadap pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

Tidak ada hambatan.

15. Berapa nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera di Kabupaten Bantul?

15 orang

16. Berapa perbandingan nasabah dari kalangan agribisnis yang menggunakan pembiayaan dibandingkan nasabah yang bukan dari kalangan agribisnis di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Presentase dari agribisnis memang kecil dari segi plafondnya juga masih kecil. Mungkin tidak sampai di 10%.

Kalau saat ini yang kami rencanakan target pasar yaitu sektor UKM. Di tahun 2018 ini bank madina ingin memperdekat jarak dengan nasabah, yaitu dg mendirikan kantor kas di lokasi yang lebih dekat kegiatan UKM, contohnya pasar. Kita punya beberapa pemula pengusaha, namun tetap dari bank madina memperhatikan kemampuan mereka dalam membayar.

17. Berapa besar pinjaman rata-rata nasabah dari kalangan pelaku agribisnis PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Bervariasai. Minimal tidak ada yang dibawah 30juta.

18. Bagaimana pengembalian pembiayaan syariah oleh nasabah agribisnis kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

Alhamdulillah sektor agribisnis itu semua lancar.

Salah mitigasi kita terhadap nasabah agribisnis itu kita lihat pengalaman dia di usaha agribisnisnya, kebanyakan yang kita biayai yaitu nasabah-nasabah yang sudah berpengalaman di bidangnya.

19. Berapa rata-rata bagi hasil untuk pelaku agribisnis di Kabupaten Bantul?

20. Apakah pembiayaan yang diberikan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada pelaku agribisnis sudah efektif?

Menurut saya sudah efektif. Buktinya kapasitas nasabah-nasabah makin lama makin besar artinya bisnis mereka berkembang. Misalnya dulu dia pinjam hanya 50 juta, kemudian sekarang sudah 120jt, itu kan berarti bisnisnya sudah berkembang. Melihat usaha yang berkembang tersebut, beberapa tetangga ikut terjun ke usaha agribisis tersebut. Tetangga yang mulai terjun ke sektor agribisnis tersebut kemudian direkomendasikan kepada bank madina.

HASIL WAWANCARA

NASABAH AGRIBISNIS PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara : 19 Maret 2018
Waktu Wawancara : 14.50 s.d 15.20
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Mujiyem

A. Identitas

Nama : Mujiyem
Usia : 53
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Beji, Sumber Agung, Jetis, Bantul
Pekerjaan Utama : Petani

B. Daftar Pertanyaan

- 1) Berapa lama bekerja di bidang pertanian?
Sejak tahun 1996
- 2) Usaha pertanian apa yang sedang dikembangkan?
Padi
- 3) Apa masalah dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Padinya gabuk, hama, dan modal yang kurang mencukupi
- 4) Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Menggunakan pestisida dan mengajukan pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga

- 5) Pernahkah menggunakan pembiayaan dari bank lain selain PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak pernah. Menggunakan pembiayaan sejak tahun 1996.

- 6) Apakah saat ini menggunakan pembiayaan lain selain dari PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak

- 7) Kenapa memilih menggunakan produk perbankan syariah?

Pengembalian mudah dan tidak memberatkan nasabah karena menggunakan sistem bagi hasil

- 8) Kenapa memilih untuk menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Mudah dalam mengajukan dana, pencairan dana cukup cepat, kemudahan dalam pengembalian uang, dan sudah ada kepercayaan terhadap BPRS BDW

- 9) Bagaimana bentuk penawaran pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Adanya penawaran dari AO BPRS BDW. Penawaran tersebut dari Bu Yuli dengan pendekatan personal

- 10) Jenis pembiayaan syariah apa yang digunakan?

Mudharabah

- 11) Kenapa memilih menggunakan jenis pembiayaan syariah tersebut?

Disarankan oleh pihak BPRS BDW

12) Berapa besar pinjaman yang diajukan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

50jt s.d 100jt

13) Berapa lama angsuran pemberian yang diambil?

20 bulan

14) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pemberian PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, karena ada AO yang mengarahkan dalam memenuhi persyaratan.

15) Bagaimana tahap pengajuan pemberian kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tahap pengajuan pemberian yang cepat yaitu 5 hari sudah bisa cair

16) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pemberian agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?

5 hari sudah bisa cair

17) Bagaimana pendampingan usaha oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabah?

Tidak ada pendampingan usaha, hanya sebatas silaturrahmi yang sering dilakukan oleh pihak bank ke rumah bu Mujiyem

18) Bagaimana bagi hasil yang digunakan PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap pemberian yang diambil?

Bagi hasil yang diberikan kepada BPRS yaitu sedang, tidak memberatkan nasabah.

19) Bagaimana pelayanan pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pelayanannya sudah baik

20) Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut?

Untuk kegiatan operasional pertanian, dan untuk membeli atau menyewa lahan baru

21) Apa saja tanaman yang ditanam?

Padi, jagung, kacang, dan kedelai

22) Berapa pendapatan pertanian sebelum pembiayaan?

200 lobang dengan pendapatan 3jt, dan dalam setahun 3 kali panen.

23) Berapa pendapatan pertanian setelah pembiayaan?

Sekali panen 10jt dan dalam setahun 3 kali panen.

24) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap hasil pertanian nasabah?

Hasil pertanian meningkat karena ada lahan pertanian baru

25) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

Keuntungan meningkat.

Keuntungan tanaman padi sekali panen. Setiap 100 lobang atau 1000m laba 1,2jt dg kepemilikan seluas 5000m, jadi laba sekali panen 6jt. Jadi dalam satu tahun keuntungan panen padi sebesar 18jt. Keuntungan tanaman kacang atau jagung. Per 5000m memiliki laba 7,5jt.

HASIL WAWANCARA

NASABAH AGRIBISNIS PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2018
Waktu Wawancara : 15.25 s.d. 15.50
Lokasi Wawancara : Rumah Bu Mursidah

A. Identitas

Nama : Mursidah
Usia : 46
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Banyu urip, Catur Harjo, Pandak, Bantul
Pekerjaan Utama : Peternak Ayam

B. Daftar Pertanyaan

- 1) Berapa lama bekerja di bidang pertanian?
Sejak tahun 2002 jadi sudah 5 tahun
- 2) Usaha pertanian apa yang sedang dikembangkan?
Ternak ayam
- 3) Apa masalah dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Adanya masalah kurangnya air untuk pakan ternak, dan ada kendala di permodalan.
- 4) Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?

Membeli air PAM untuk pakan ternak dan mengajukan pembiayaan di BPRS BDW

- 5) Pernahkah menggunakan pembiayaan dari bank lain selain PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pernah menggunakan produk Bank BRI, tapi karena ada masalah dalam pengembalian kredit, maka Bank BRI sudah tidak memberikan pinjaman modal lagi.

- 6) Apakah saat ini menggunakan pembiayaan lain selain dari PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak

- 7) Kenapa memilih menggunakan produk perbankan syariah?

Sistem bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah

- 8) Kenapa memilih untuk menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pengembalian yang mudah dan ringan

- 9) Bagaimana bentuk penawaran pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Adanya penawaran dari salah satu AO BPRS BDW

- 10) Jenis pembiayaan syariah apa yang digunakan?

Mudharabah

- 11) Kenapa memilih menggunakan jenis pembiayaan syariah tersebut?

Diarahkan pihak bank untuk menggunakan akad tersebut

12) Berapa besar pinjaman yang diajukan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

25juta

13) Berapa lama angsuran pемbiayaan yang diambil?

2 tahun

14) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pемbiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak ada

15) Bagaimana tahap pengajuan pемbiayaan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tahap pengajuan mudah, karena dipandu oleh AO.

16) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pемbiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Udah dan cepat, 3 s.d 4 hari sudah bisa cair

17) Bagaimana pendampingan usaha oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabah?

Tidak ada pendampingan, hanya sekedar silaturrahmi

18) Bagaimana bagi hasil yang digunakan PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap pемbiayaan yang diambil?

Bagi hasil tidak memberatkan nasabah

19) Bagaimana pelayanan pемbiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pelayanan yang baik, jadi sudah seperti keluarga sendiri

20) Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut?

Untuk membeli pakan ternak ayam, obat, dan air PAM

21) Apa saja tanaman yang ditanam?

Ternak ayam

22) Berapa pendapatan pertanian setelah pembiayaan?

Setiap 36 sekali panen

Jika keadaan bagus 2000 ekor 10jt per panen

Jika keadaan tidak bagus 1500 ekor 3jt per panen

23) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap hasil pertanian nasabah?

Hasil peternakan ayam tetap karena tempat ternak tetap, sehingga kapasitasnya sama.

24) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

Jika dalam kondisi bagus maka keuntungan naik

Jika dalam kondisi tidak bagus maka keuntungan tetap atau bisa turun.

Kondisi ternak yang tidak bagus disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, yaitu terlalu panas, atau terlalu dingin. Contohnya pada bulan November cuaca ekstrim yg menimbulkan banjir dan pemadaman yang lumayan lama menyebabkan ternak banyak yang mati, akhirnya kami mengalami kerugian.

HASIL WAWANCARA

NASABAH AGRIBISNIS PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara : 5 April 2018
Waktu Wawancara : 15.35 s.d. 16.02
Lokasi Wawancara : Rumah Pak Sumarjo

A. Identitas

Nama : Sumarjo
Usia : 58
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jimatan, Jatirego, Lemdah, Kulon Progo
Pekerjaan Utama : Petani

B. Daftar Pertanyaan

- 1) Berapa lama bekerja di bidang pertanian?
Sejak tahun 1986 hingga sekarang
- 2) Usaha pertanian apa yang sedang dikembangkan?
Menanam padi dan melon
- 3) Apa masalah dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Hama, dan modal kurang mencukupi
- 4) Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Memberikan pestisida dan mengajukan pembiayaan di bank

- 5) Pernahkah menggunakan pembiayaan dari bank lain selain PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Tidak pernah
- 6) Apakah saat ini menggunakan pembiayaan lain selain dari PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Tidak
- 7) Kenapa memilih menggunakan produk perbankan syariah?
- Karena tidak memberatkan nasabah
- 8) Kenapa memilih untuk menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Lebih mudah dan enak
- 9) Bagaimana bentuk penawaran pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- Di ajak rekan yang menggunakan pembiayaan di BPRS BDW
- 10) Jenis pembiayaan syariah apa yang digunakan?
- Mudharabah
- 11) Kenapa memilih menggunakan jenis pembiayaan syariah tersebut?
- Karena diarahkan oleh pihak bank
- 12) Berapa besar pinjaman yang diajukan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?
- 3jt s.d60 juta
- 13) Berapa lama angsuran pembiayaan yang diambil?
- 1 tahun

14) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak sulit, karena nasabah lama lebih diprioritaskan

15) Bagaimana tahap pengajuan pembiayaan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tahap pengajuan mudah karena dipandu oleh pihak bank

16) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Mudah, 1 hari bisa cair karena merupakan nasabah lama

17) Bagaimana pendampingan usaha oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabah?

Tidak ada pendampingan usaha, hanya sekedar silaturrahmi saja oleh pihak bank ke rumah

18) Bagaimana bagi hasil yang digunakan PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap pembiayaan yang diambil?

Tidak memberatkan nasabah

19) Bagaimana pelayanan pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pelayanannya bagus

20) Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut?

Untuk membeli sawah

21) Apa saja tanaman yang ditanam?

22) Berapa pendapatan pertanian sebelum pembiayaan?

½ ha dg biaya tanam s.d panen 1 juta. 1/2 ha 3,5 ton dg harga per kw 42rb

23) Berapa pendapatan pertanian setelah pembiayaan?

Biaya tanam padi s.d panen 8jt-9jt/ha. Paling keuntungannya Dan pak sumarjo memiliki 2 ha tanah. ½ ha 3,5 ton dg harga 40rb kw. Dan 1 tahun 2 kali panen padi. Kedelai untung 1 juta /1500m

1kg gabah = 5.500

1 ton gabah = 5.500.000/1,2 ha = 38.500.000/1 ha

1 ha kedelai laba 3.300.000

24) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap hasil pertanian nasabah?

Sawah yang dimiliki menjadi 2 ha yang awalnya hanya ½ ha. Sehingga hasil pertanian meningkat

25) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

Keuntungannya juga meningkat

HASIL WAWANCARA

NASABAH AGRIBISNIS PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Tanggal Wawancara : 4 April 2018
Waktu Wawancara : 13.47 s.d. 14.11
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Yaminah

A. Identitas

Nama : Yaminah
Usia : 42
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Pekerjaan Utama : Petani

B. Daftar Pertanyaan

- 1) Berapa lama bekerja di bidang pertanian?
Sudah 30 tahun
- 2) Usaha pertanian apa yang sedang dikembangkan?
Padi dan kacang tanah
- 3) Apa masalah dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Harga pupuk mahal dan obat-obatan mahal, adanya keterbatasan modal
- 4) Bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian?
Mengajukan pembiayaan di bank

- 5) Pernahkah menggunakan pembiayaan dari bank lain selain PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pernah, yaitu bank BRI

- 6) Apakah saat ini menggunakan pembiayaan lain selain dari PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak

- 7) Kenapa memilih menggunakan produk perbankan syariah?

Karena sistem bagi hasil tidak memberatkan nasabah dalam pengembaliannya

- 8) Kenapa memilih untuk menggunakan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Menggunakan pembiayaan di BDW sejak 1997. Selain mudah yaitu kantor BDW dekat dengan rumah

- 9) Bagaimana bentuk penawaran pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Karena dekat dengan rumah maka tau adanya bank BDW

- 10) Jenis pembiayaan syariah apa yang digunakan?

Mudharabah

- 11) Kenapa memilih menggunakan jenis pembiayaan syariah tersebut?

Karena direkomendasikan oleh pihak bank untuk menggunakan akad tersebut

- 12) Berapa besar pinjaman yang diajukan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

2 juta

13) Berapa lama angsuran pembiayaan yang diambil?

4 bulan

14) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tidak ada

15) Bagaimana tahap pengajuan pembiayaan kepada PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tahap pengajuan yang mudah karena dipandu oleh pihak perbankan

16) Bagaimana kemudahan dalam tahap pencairan dana pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Tahap pencairan dana cepat, paling lama yaitu 1 minggu uang sudah cair

17) Bagaimana pendampingan usaha oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabah?

Tidak ada pendampingan usaha dari ihak bank, hanya sekedar silaturrahmi saja

18) Bagaimana bagi hasil yang digunakan PT BPRS Bangun Drajat Warga terhadap pembiayaan yang diambil?

Bagi hasil yang diberikan kepada bank tidak memberatkan nasabah

19) Bagaimana pelayanan pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga?

Pelayanannya baik

20) Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut?

Untuk biaya tenaga kerja operasional

21) Apa saja tanaman yang ditanam?

Padi dan kacang tanah

22) Berapa pendapatan pertanian sebelum pembiayaan?

Lahan pertanian sebelum pembiayaan yaitu 1 ha

23) Berapa pendapatan pertanian setelah pembiayaan?

Lahan pertanian sudah 1,5 ha

Padi $1000\text{m} = 3 \text{ kw} - 1 \text{ kg} = 10.000$

Kacang = $3 \text{ kw} = 5000/\text{kg}$

24) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap hasil pertanian nasabah?

Meningkat, karena bisa membeli lahan seluas $\frac{1}{2}$ ha, sehingga menambah hasil petanian

25) Bagaimana dampak pembiayaan syariah PT BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap keuntungan hasil pertanian nasabah?

Keuntungan meningkat, karena yang dulunya hanya 1 ha kini menjadi 1,5 ha

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pihak BPRS Bangun Drajat Warga



2. Wawancara dengan Pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera



3. Wawancara dengan Nasabah

